



PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

JOMBANG
SANTIA



2025 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN JOMBANG



Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid
No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmptsp.jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi tahun 2025 dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun 2025, yang memuat data kinerja yang akuntabel, meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Disamping itu juga dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa data alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu landasan yuridis formal dan instrumen untuk mengukur serta

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah pada berbagai level instansi.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang selama Tahun 2025 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN JOMBANG


BAYU PANCORoadi, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19741209 200312 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Fungsi Strategis Perangkat Daerah	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Perencanaan Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)	14
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	24
3.1.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir	29
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	34
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level di Level Nasional/Internasional.....	39
3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja.....	42
3.2 Realisasi Anggaran	46
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	46
3.2.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	49
3.2.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	67
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran	74
----------------	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
- Lampiran 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025
- Lampiran 4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2025
- Lampiran 5. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2025
- Lampiran 6. Pengukuran Kinerja 2025

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Data SDM Menurut Golongan	5
Tabel 1.2.2 Data SDM Menurut Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.3 Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3.1 Identifikasi Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	9
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025	14
Tabel 2.2.1.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	16
Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	19
Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja	22
Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 ...	24
Tabel 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir.....	29
Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	33
Tabel 3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional	35
Tabel 3.1.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional	36
Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	41
Tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran.....	48
Tabel 3.2.3 Daftar Kebutuhan Pegawai.....	53
Tabel 3.2.4 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2025	56
Tabel 3.2.5 Efisiensi Sarana dan Prasarana Tahun 2025	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan akuntabel dan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil / manfaat kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Selanjutnya, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu prinsip utama dalam tata pemerintahan yang baik, yang mencerminkan komitmen instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai instrumen pelaporan kinerja yang memuat tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, serta analisis atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LKjIP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dan sebagai instansi yang bertugas mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. Serta instansi penyelenggara dan penyediaan fasilitas gerai pelayanan pada Mal Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menyelenggarakan fungsi :

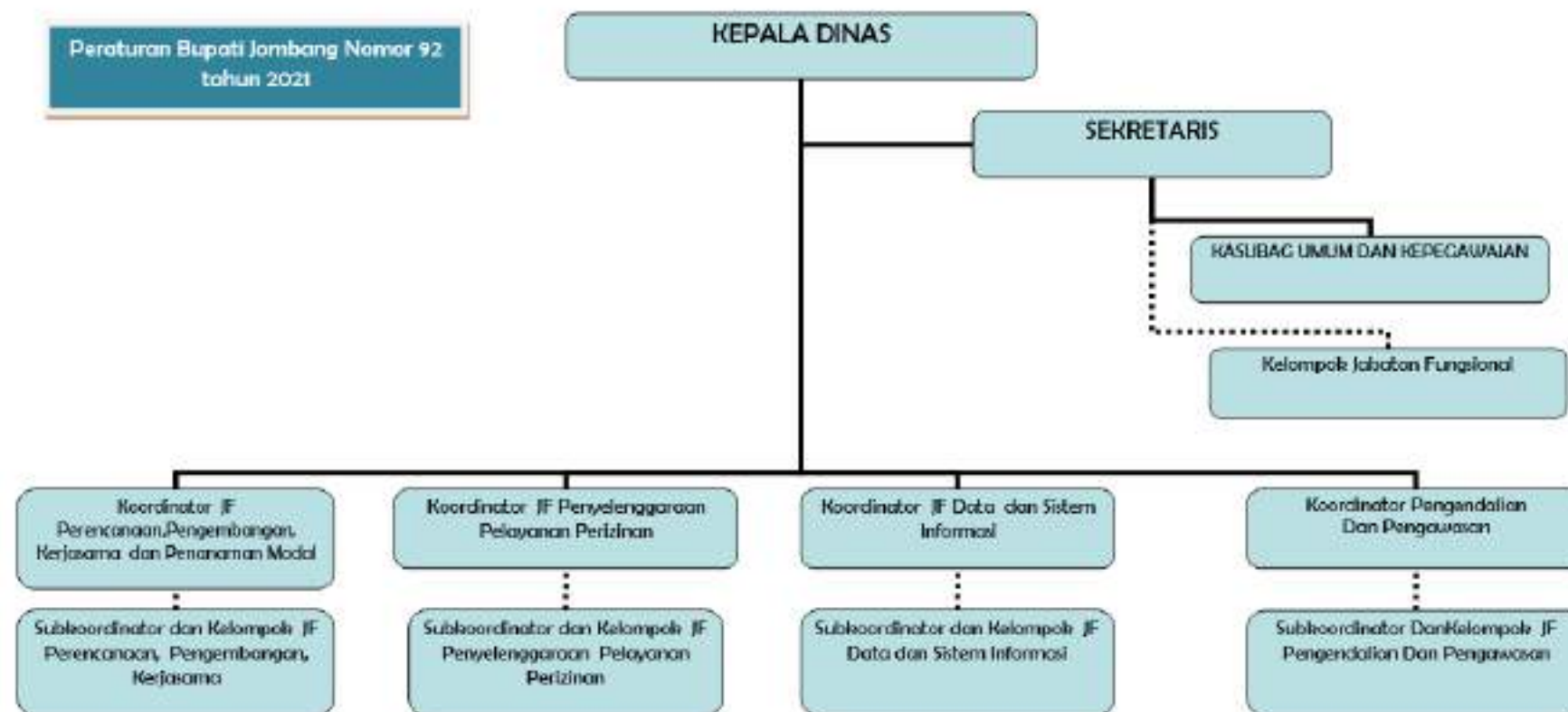
- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Berkoordinasi dengan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
5. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
6. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan, berkoordinasi dengan:
5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**Bagan Struktur Organisasi****Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang memiliki 42 (Empat Puluh Dua) Sumber Daya Manusia, meliputi 29 (Tiga Puluh) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK Penuh Waktu dan 10 (Sepuluh) orang PPPK Paruh Waktu. Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 1.2.1
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
I	-
II	4 orang
III	20 orang
IV	5 orang
PPPK Penuh Waktu	3 orang
PPPK Paruh Waktu	10 orang
Jumlah	42 orang

Tabel 1.2.2
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	JUMLAH
Laki-Laki	19	1	6	26
Perempuan	10	2	4	16
Jumlah	29	3	10	42

Tabel 1.2.3
Data Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu
1	S2	8	-	-
2	S1	16	1	5
3	D1-D3	2	1	-
4	SLTA	3	1	5
5	SLTP	-	-	-
6	SD	-	-	-
	JUMLAH	29	3	10

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, memiliki peta proses bisnis utama yang merupakan penjelasan dari proses bisnis dari tiap bidang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati. Program peningkatan mutu pelayanan perizinan merupakan program yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program ini memiliki keterkaitan proses dengan Pencabutan Izin, Rekomendasi Teknis, Regulasi Izin, dan Permohonan Izin. Hal tersebut dapat mempengaruhi program peningkatan mutu pelayanan perizinan. Rekomendasi teknis merupakan dasar pertimbangan penerbitan izin sehingga kualitas mutu pelayanan rekomendasi teknis akan mempengaruhi secara langsung Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi penanaman modal, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan proses dengan Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan. Output perizinan pelaku usaha ditindak lanjuti oleh kegiatan pengendalian penanaman modal dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara periodik triwulan. Diharapkan dari 2 (dua) program yang berkesinambungan ini dapat meningkatkan realisasi investasi penanaman modal. Dalam rangka pemenuhan data penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan prima, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan dengan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Data perizinan yang terbit dapat menjadi data utama penanaman modal. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dapat juga memanfaatkan teknologi sistem informasi yang dikembangkan dalam Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan prima berbasis teknologi system informasi dan keakuratan data penanaman modal. Program penunjang dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan terkait dukungan perlengkapan, sumber daya manusia dan anggaran. Hal itu termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Perencanaan Strategis Pelaporan Kinerja yang diampu oleh Sekretariat. Dukungan tersebut sangatlah diperlukan untuk implementasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga sebagai instansi penyelenggara dan penyediaan fasilitas gerai pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jombang.

Saat ini terdapat 12 (dua belas) Gerai Layanan di pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jombang yang terdiri dari :

1. Kementerian Agama Kabupaten Jombang
2. ATR/BPN
3. Dinas PUPR
4. BPJS Kesehatan
5. BPJS Ketenagakerjaan
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. KPP Pratama
9. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
10. Dinas Kesehatan
11. Taspen
12. Pengadilan Agama
13. Pengadilan Negeri
14. Help Desk

Gerai layanan ini masih akan bertambah sesuai dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jombang dan akan disiapkan sebanyak 20 gerai layanan publik.

Berikut penjelasan tentang peran serta dan manfaat dari pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari sisi peningkatan nilai investasi dan kemudahan pelayanan perizinan:

Peran serta Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam Peningkatan Nilai Investasi

- a. Peningkatan Efisiensi: MPP dapat mempercepat proses pelayanan perizinan

dan pengelolaan dokumen, sehingga investor dapat lebih cepat memulai usahanya.

- b. Pengurangan Biaya: Dengan adanya MPP, investor tidak perlu lagi mengunjungi beberapa kantor pemerintah untuk mengurus perizinan, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.
- c. Peningkatan Transparansi: MPP dapat memperbarui informasi tentang proses pelayanan perizinan dan pengelolaan dokumen, sehingga investor dapat lebih mudah memahami proses dan persyaratan yang diperlukan.

Dengan demikian, MPP dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan nilai investasi dan kemudahan pelayanan perizinan, sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan peningkatan nilai investasi.

1.3 FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yaitu:

- Meningkatkan Penanaman Modal Daerah

Identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Minimnya daya tarik kawasan investasi daerah
Kawasan investasi di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya didukung infrastruktur dasar, utilitas, dan promosi yang memadai, sehingga belum optimal menarik minat investor untuk berinvestasi.
2. Kurangnya informasi dan data potensi investasi yang akurat
Pengelolaan data dan informasi potensi investasi Kabupaten Jombang belum terintegrasi dan belum sepenuhnya mutakhir, sehingga belum mampu menjadi referensi yang kuat bagi calon investor.

3. Kurangnya kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM local
Peran DPMPTSP dalam mendorong fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal di Kabupaten Jombang belum optimal, sehingga manfaat investasi bagi pelaku usaha lokal masih terbatas.
4. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM
Sebagian pelaku usaha di Kabupaten Jombang belum memahami kewajiban penyampaian LKPM melalui sistem OSS, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan investasi.
5. Kurangnya insentif daerah dan fasilitasi bagi calon investor
Kebijakan insentif dan kemudahan investasi yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya meningkatkan daya saing investasi daerah.
6. Belum maksimalnya penerbitan perizinan berusaha tepat waktu sesuai SOP
Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha pada DPMPTSP Kabupaten Jombang masih menghadapi kendala teknis dan administratif, sehingga penyelesaian izin belum seluruhnya sesuai standar waktu pelayanan.
7. Rendahnya penggunaan sistem OSS berbasis risiko oleh pelaku usaha
Tingkat pemanfaatan sistem OSS berbasis risiko oleh pelaku usaha di Kabupaten Jombang masih rendah akibat keterbatasan pemahaman, literasi digital, dan pendampingan teknis.
8. Tidak maksimalnya konsultasi dan edukasi OSS kepada masyarakat
Kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan penggunaan OSS yang dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Jombang belum menjangkau seluruh pelaku usaha, sehingga pemahaman masyarakat terhadap perizinan berbasis elektronik masih belum merata.

Tabel 1.3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya daya saing dan realisasi investasi	Minimnya daya tarik kawasan investasi daerah	Kegiatan promosi investasi belum menyasar sektor potensial secara efektif

		Kurangnya informasi dan data potensi investasi yang akurat	Data PIR belum terbarukan dan belum tersosialisasi secara digital Peta potensi investasi belum lengkap dan tidak terpublikasi luas
		Kurangnya kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM lokal	Belum terbangun platform/jembatan kolaborasi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
		Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM	Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha dalam penyampaian LKPM
2	Lemahnya dukungan regulasi dan fasilitasi investasi	Kurangnya insentif daerah dan fasilitasi bagi calon investor	Belum adanya insentif daerah yang aplikatif dan fasilitasi yang cukup bagi calon investor
3	Kualitas pelayanan belum sesuai harapan masyarakat	belum maksimalnya penerbitan perizinan berusaha yang tepat waktu sesuai SOP	SOP belum diimplementasikan secara optimal
		Rendahnya penggunaan sistem OSS berbasis risiko oleh pelaku usaha	Kurangnya literasi digital dan pendampingan teknis terhadap pelaku usaha
		Tidak maksimalnya konsultasi dan edukasi OSS kepada masyarakat	Kurangnya SDM pendamping OSS di tingkat daerah

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 263 ayat 3, menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari 2025, yaitu H. Warsubi, S.H., M.Si. dan H. Salmanuddin, S.Ag., M.PD.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD bersumber dari Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu jabatan 5 tahun ke depan. Visi pembangunan daerah Kabupaten Jombang untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, maka misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berbudi Pekerti Luhur, Religius dan Berdaya Saing Global.
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
4. Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal.
5. Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada :

1. Misi ke 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah secara berkesinambungan
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Sasaran : Meningkatnya Investasi Daerah
Indikator : Persentase peningkatan realisasi investasi
2. Misi ke 5 : Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif
Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital
Sasaran : Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif
Indikator : Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Jombang Tahun 2025-2029, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Berikut dirumuskan Tujuan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang tahun 2025-2029 adalah :

1. Tujuan : Meningkatkan Penanaman Modal Daerah
Indikator Tujuan : Persentase peningkatan realisasi investasi
2. Sasaran OPD
 - a. Meningkatnya Realisasi investasi daerah
Indikator : Realisasi Investasi Daerah
 - b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Adapun dalam pencapaian visi dan misi yang mengacu pada misi ke-2 dan 5 RPJMD Kabupaten Jombang terdapat faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi tercapainya visi dan misi itu sendiri diantara lain :

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Belum terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan perizinan dan Penanaman Modal
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk percepatan pelayanan perizinan dan penanaman modal
3. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD Teknis
4. Jumlah sumber daya manusia untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan kompetensi belum optimal
5. Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan perizinan yang belum optimal
6. Belum optimalnya data aktual pendukung LKPM
7. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari fungsi DPM PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang yakni :

1. Tersedianya teknologi informasi untuk pelayanan perizinan berusaha (OSS- RBA) dan pelayanan perizinan non berusaha (Sirindunona)
2. Jaringan kerja dan stakeholder berjalan dengan baik
3. Tersedianya SOP, SP serta ISO dalam mendukung pelayanan perizinan dan penanaman modal
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang
5. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
6. Terdapatnya Mal Pelayanan Publik yang akan mempercepat dan mempermudah akses pelayanan perizinan bagi masyarakat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian/ Penetapan Kinerja tahun 2025 mengacu pada RKT Tahun 2025 Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2025 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1	TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%
	Sasaran Strategis:		
a	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	1598000000000 s.d 2820000000000
b	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91
c	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,25

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Jenis Usaha Baru Yang Masuk Di Oss	Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk Di Oss	5%	Rp423.471.130
2.	Meningkatnya Penambahan Investasi Baru	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Penambahan Investasi Baru	10%	Rp248.331.850
3.	Pencapaian Target Realisasi Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	85%	Rp158.341.250
4.	Meningkatnya Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop	90%	Rp186.365.950
5.	Meningkatnya Pengguna Data Pelayanan Perizinan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengguna Data Pelayanan Perizinan	90%	Rp104.930.250
6.	Meningkatnya Akuntabilitas Dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Akip Perangkat Daerah	80,25 Nilai	Rp9.093.805.887
JUMLAH					Rp10.215.246.317

2.2.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 di atas, untuk mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah didukung oleh 6 (enam) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan. Dengan total pagu anggaran Rp 10.215.246.317,- (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Koma Tujuh*), yang sumber pendanaan berasal dari APBD dan DAK Non Fisik. Untuk program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 antara lain disajikan pada tabel sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.2.1.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2.18	URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PRESENTASE DOKUMEN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI YANG DIMANFAATKAN	100%	100%	100%	Rp144.256.830	0%	Rp28.794.520	100%	Rp248.331.850	0%	Rp104.075.020	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp144.256.830	0 Dokumen	Rp28.794.520	2 Dokumen	Rp248.331.850	0 Dokumen	Rp104.075.020	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	Rp144.256.830	0 Dokumen	Rp28.794.520	2 Dokumen	Rp248.331.850	0 Dokumen	Rp104.075.020	Penambahan anggaran Mamin Rapat dan Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Untuk kegiatan pembahasan Perbup



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
													dan Sosialisasi Perbup pemberian insentif
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAK LANJUT PENYELENGGA RAAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	100%	100%	100%	Rp527.546.150	0%	Rp29.206.550	100%	Rp423.471.130	0%	-Rp104.075.020	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tindak lanjut penyelenggara an promosi penanaman modal	105 Kali	35 kali	35 Kali	Rp527.546.150	0 Kali	Rp29.206.550	35 Kali	Rp423.471.130	0 Kali	-Rp104.075.020	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kot a	6 dokumen	5 dokumen	4 Dokume n	Rp527.546.150	0 Dokume n	Rp29.206.550	4 Dokume n	Rp423.471.130	0 Dokumen	-Rp104.075.020	Untuk anggaran Fotocopy, Souvenir, Honorarium, Belanja Sewa Electric Generating Set dan Doom dan Stand untuk support kegiatan GPIU dan Seminar Investasi
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG DITERBITKAN TEPAT WAKTU SESUAI SOP	85%	95,38%	85%	Rp176.340.950	82,95%	Rp86.529.090	85%	Rp186.365.950	0%	Rp10.025.000	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu	Presentase Pelayanan Perizinan Yang	95%	95,43%	92%	Rp154.191.200	89,62%	Rp81.626.840	92%	Rp164.216.200	0%	Rp10.025.000	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
	Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Diterbitkan											
		Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%	100,00%	100%	Rp22.14 9.750	100%	Rp4.902.2 50	100%	Rp22.149.750	0%	Rp0	
2.18.04. 2.01.000 6	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6.000 pelaku usaha	30. 853 pelaku usaha	8.000 pelaku usaha	Rp138.1 99.450	2762 pelaku usaha	Rp70.037. 063	8000 pelaku usaha	Rp148.224.450	0 pelaku usaha	Rp10.025.000	Untuk souvenir, bahan cetak, Mamin Rapat dan Honor panitia pada support kegiatan Pinter Ngaji
2.18.04. 2.01.000 7	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	24 pelaku usaha	24 pelaku usaha	16 orang	Rp22.14 9.750	13 orang	Rp4.902.2 50	24 pelaku usaha	Rp22.149.750	8 orang	Rp0	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000 kegiatan usaha	28.403 kegiatan usaha	2.500 kegiatan usaha	Rp15.991.750	1114 kegiatan usaha	Rp11.589.777	2500 kegiatan usaha	Rp15.991.750	0 kegiatan usaha	Rp0	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	85%	275,79%	80%	Rp158.341.250	107,37%	Rp130.077.620	80%	Rp158.341.250	0%	Rp0	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	290 Perusahaan	262 kegiatan usaha	95 Perusahaan	Rp158.341.250	102 Perusahaan	Rp130.077.620	150 Perusahaan	Rp158.341.250	55 Perusahaan	Rp0	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30 Pelaku Usaha	105 pelaku usaha	140 Pelaku usaha	Rp137.302.750	226 Pelaku usaha	Rp123.296.420	200 Pelaku Usaha	Rp137.302.750	60 Pelaku Usaha	Rp0	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	96 Kegiatan Usaha	262 kegiatan usaha	95 Kegiatan Usaha	Rp21.038.500	102 Kegiatan Usaha	Rp6.781.200	150 Kegiatan Usaha	Rp21.038.500	55 Kegiatan Usaha	Rp0	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	23%	236%	23%	Rp104.930.250	0%	Rp41.758.384	23%	Rp104.930.250	0%	Rp0	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	11.500 pengguna	46140 pengguna	3500 pengguna	Rp104.930.250	123684 pengguna	Rp41.758.384	39000 pengguna data	Rp104.930.250	35500 pengguna data	Rp0	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 dokumen	8 dokumen	8 Dokumen	Rp104.930.250	4 Dokumen	Rp41.758.384	8 dokumen	Rp104.930.250	0 Dokumen	Rp0	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	100%	99,50%	100%	Rp8.847.703.036	50%	Rp3.592.638.913	100%	Rp9.093.805.887	0%	Rp246.102.851	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	Rp37.603.000	50%	Rp22.636.195	100%	Rp43.570.200	0%	Rp5.967.200	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	Rp13.677.500	1 Dokumen	Rp10.272.000	3 Dokumen	Rp16.700.650	0 Dokumen	Rp3.023.150	Penambahan anggaran Belanja Fotocopy dokumen Renja, RKA, Renstra
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 dokumen	15 dokumen	15 Laporan	Rp23.925.500	11 Laporan	Rp12.364.195	15 Laporan	Rp26.869.550	0 Laporan	Rp2.944.050	Penambahan anggaran Belanja Fotocopy dokumen Capaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	Rp5.274.845.926	50%	Rp2.762.068.587	100%	Rp5.245.351.777	0%	-Rp29.494.149	
		Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	Rp187.632.000	50%	Rp95.795.800	100%	Rp186.912.000	0%	-Rp720.000	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang	30 orang/ bulan	50 orang	Rp5.274.845.926	50 orang	Rp2.762.068.587	50 orang	Rp5.245.351.777	0 orang	-Rp29.494.149	
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 Dokumen	Rp181.182.000	6 Dokumen	Rp90.900.000	12 Dokumen	Rp180.462.000	0 Dokumen	-Rp720.000	Untuk penambahan pada kekurangan honor PA, PPK, Bendahara, PPK SKPD
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	Rp2.616.000	1 Laporan	Rp2.615.800	1 Laporan	Rp2.616.000	0 Laporan	Rp0	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	17 laporan	17 Laporan	Rp3.834.000	8 Laporan	Rp2.280.000	17 Laporan	Rp3.834.000	0 Laporan	Rp0	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD	100%	100%	100%	Rp0			100%	Rp0	0%	Rp0	
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 paket	30 paket	50 Paket	Rp0			0	Rp0	-50	Rp0	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 pegawai	44 orang							0 orang	Rp0	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	Rp390.106.695	50%	Rp190.205.256	100%	Rp496.456.970	0%	Rp106.350.275	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 paket	10 paket	9 Paket	Rp8.829.150	6 Paket	Rp4.397.040	14 Paket	Rp8.829.150	5 Paket	Rp0	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 paket	60 paket	45 Paket	Rp89.389.795	23 Paket	Rp61.489.507	80 Paket	Rp137.787.570	35 Paket	Rp48.397.775	Untuk penambahan anggaran ATK dan Bahan Pembersih (Kantor DPMP TSP dan Support MPP) yang hanya tersedia 9 bulan
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	8 paket	6 Paket	Rp1.989.000	3 Paket	Rp999.999	6 Paket	Rp1.989.000	0 Paket	Rp0	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	3 Paket	Rp135.20.000	3 Paket	Rp49.657.500	3 Paket	Rp154.170.000	0 Paket	Rp18.950.000	Untuk penambahan anggaran : 1. Mamin Jamuan Tamu (Kantor DPMP TSP dan Support MPP) yang hanya tersedia 9 bulan, 2. Mamin Rapat dengan anggaran tersisa Rp 1.615.000,-



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 Paket	Rp45.624.750	2 Paket	Rp32.495.170	2 Paket	Rp54.627.250	0 Paket	Rp9.002.500	Untuk penambahan anggaran Fotocopy dan Cetak yang hanya tersedia 9 bulan
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	3 dokumen	3 Dokume n	Rp40.400.000	3 Dokume n	Rp14.640.000	3 Dokume n	Rp60.400.000	0 Dokumen	Rp20.000.000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40 laporan	30 Laporan	Rp68.654.000	8 Laporan	Rp26.526.040	40 Laporan	Rp78.654.000	10 Laporan	Rp10.000.000	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	99,50%					100%	Rp82.495.000	100%	Rp82.495.000	
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana da Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	60 unit	198 unit					6 unit	Rp82.495.000	6 Unit	Rp82.495.000	1. Belanja modal iris camera (MPP-Dukcapil) 2. Belanja modal komputer AIO desktop PC
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan penunjang urusan	100%	100%	100%	Rp712.062.415	50%	Rp306.817.840	100%	Rp717.861.500	0%	Rp5.799.085	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/s ub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
	Daerah	pemerintah daerah											
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	Rp3.000.000	6 Laporan	Rp1.500.000	12 Laporan	Rp3.000.000	0 Laporan	Rp0	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 laporan	12 Laporan	Rp186.000.000	6 Laporan	Rp68.598.585	12 Laporan	Rp152.300.000	0 Laporan	-Rp33.700.000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 jenis	11 laporan	9 Laporan	Rp523.062.415	6 Laporan	Rp236.719.255	9 Laporan	Rp562.561.500	0 Laporan	Rp39.499.085	Untuk anggaran Penjaga Malam/security dan Cleaning services MPP yang belum dianggarkan teranggarkan di tahun 2025
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	Rp2.245.453.000	50%	Rp215.115.235	100%	Rp2.321.158.440	0%	Rp75.705.440	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	Rp51.000.000	1 unit	Rp26.380.055	1 unit	Rp39.440.000	0 Unit	-Rp11.560.000	



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan /Sub Kegiatan	Target kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan s/d tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan, sub kegiatan PD pada Renja 2025				Usulan perubahan target dan anggaran pada Perubahan Renja 2025		Bertambah/ (Berkurang)		Catatan
					Target Renja 2025		Realisasi Triwulan II						
					K	Rp.	K	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12=(10-6)	13=(11-7)	(14)
		dan dibayarkan Pajaknya											
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	Rp74.998.100	11 unit	Rp28.421.550	26 unit	Rp96.558.100	0 Unit	Rp21.560.000	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 juga digunakan untuk pemenuhan BBM Operasional kantor setiap Bulan
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	Rp2.064.654.900	2 unit	Rp123.586.630	2 unit	Rp2.092.654.800	0 Unit	Rp27.999.900	1. Pemeliharaan di TW IV masih belum Tersedia Untuk gedung MPP, 2. Gedung MPP untuk Tempat Parkir kendaraan, Gudang Rumah Genset dan Mushola masih belum tersedia.
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit	132 unit	75 unit	Rp54.800.000	47 unit	Rp36.727.000	125 unit	Rp92.505.540	15 Unit	Rp37.705.540	Pemeliharaan AC, Personal Computer dan Printer Tribulan IV masih belum tersedia, Untuk persiapan pemindahan Unit dari kantor DPMPTSP ke Kantor MPP
						Rp9.959.118.466		Rp3.909.005.077		Rp10.215.246.317		Rp256.127.851	



2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan oleh organisasi. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (Nilai realisasi investasi berasal dari data pada OSS dan dari laporan LKPM pada tahun n yang bersumber dari PMA-PMDN-IUMK)	Laporan Data Realisasi Investasi Daerah	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM layanan perizinan tahun (n) (Nilai IKM layanan perizinan didapatkan dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPPTSP. Nilai IKM ini berasal dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas 9 unsur yakni : - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu Penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan - Kompetensi Pelaksana - Perilaku Pelaksana - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Sarana dan prasarana	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah nilai komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada suatu Perangkat Daerah. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian atas komponen pengungkit (proses) dan komponen hasil (outcome) yang mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, serta kualitas pelayanan publik. Nilai indeks diperoleh dari pembobotan antara komponen pengungkit sebesar 60% dan komponen hasil sebesar 40%, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.	Laporan Hasil Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan perizinan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	>100%-110%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>80%-100%	Baik (Berhasil)
3	>60%-80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>20%-60%	Kurang
5	0%-20%	Sangat Kurang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Indikator Tujuan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu *Meningkatnya Daya Saing Dan Pemerataan Ekonomi Melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan Yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis Dan Sektor Unggul Lainnya* dengan indikator *Persentase Peningkatan Realisasi Investasi* merupakan lanjutan dari PK-awal, dan dalam PK-Perubahan tahun 2025 terdapat penyesuaian Tujuan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yaitu *Meningkatnya Investasi Daerah* dengan indikator tujuan tetap yakni *Persentase peningkatan realisasi investasi*.

Dalam Hal target terdapat penyesuaian yang pada PK-awal sebesar 5,1% menjadi 3%. Sedangkan untuk definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data indikator tersebut masih tetap. Untuk Sasaran Pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada awal Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi dengan indikator Nilai Realisasi Investasi target 2 Trilyun rupiah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan dengan indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 86
 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) target 4,2
 - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik target 73
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP PD target 81.

Sasaran dan indikator serta target di atas merupakan PK Awal, dan dalam PK-Perubahan Tahun 2025 terdapat penyesuaian sasaran strategis dengan mengacu Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025-2030, yaitu:

1. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah dengan indikator Realisasi Investasi Daerah target Rp 1.598.000.000.000,- s.d Rp 2.820.000.000.000,-
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) target 91
3. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah target 80,25

Untuk definisi, formulasi perhitungan, dan sumber data indikator tersebut masih tetap.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sedangkan untuk Penentuan Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2025 oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan target realisasi investasi bagi masing-masing Provinsi dan selanjutnya diturunkan ke tingkat Kabupaten/Kota sebagai bagian dari target kinerja daerah. Untuk Kabupaten Jombang dengan target 1.64 Trilyun Rupiah. Penetapan target ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Untuk target nilai realisasi investasi tahun 2025 merupakan target secara keseluruhan yang berasal dari PMA dan PMDN sebesar Rp 1.598.000.000.000,- s.d Rp 2.820.000.000.000,-.

Pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%	63,43%	2114,34%
SASARAN STRATEGIS :				
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	1.598 s.d 2.820 (Milyar Rp) *Target PK-P	2.535.606.72 0.390	100%
		1.640 (Milyar Rp)	2.535,61	154,61 %

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
		<i>*Target dari Kementerian investasi/BKPM untuk kabupaten Jombang</i>		
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Penambahan Investasi Baru	10%	N/A	N/A
Program Promosi Penanaman Modal	Prosentase jenis usaha baru yang masuk di oss	5%	N/A	N/A
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	85%	80%	94,12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91,72	100,79%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	90%	95,76%	106,40%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengguna Data Pelayanan Perizinan	90%	102%	113,33%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,25	80,52	100,34%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Akip Perangkat Daerah	80,25 Nilai	77,95 Nilai	97,13%

1. Tujuan Perangkat Daerah**Meningkatkan Penanaman Modal Daerah**

Pada Tahun 2025, target Persentase Peningkatan Realisasi Investasi ditetapkan sebesar 3%, sedangkan realisasi mencapai 63,43%. Dengan capaian tersebut, indikator tujuan menunjukkan kinerja sangat tinggi dan jauh melampaui target yang ditetapkan. Selisih yang signifikan antara target dan realisasi mengindikasikan adanya lonjakan realisasi investasi yang sangat besar pada Tahun 2025.

Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan, antara lain PT Cheil Jedang Indonesia, PT Kingsway Investments Indonesia, PT Yutoeco Technology Indonesia, PT Indonesia Royal Paper dan PT Carimax Technology Indonesia. Dengan demikian, pembentukan capaian investasi Tahun 2025 tidak hanya berasal dari masuknya investasi baru, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspansi dan pengembangan usaha yang telah beroperasi. Dari sisi intervensi Pemerintah Daerah, fasilitasi penanaman modal, kemudahan pelayanan perizinan, pendampingan pelaku usaha serta pengendalian pelaksanaan investasi merupakan faktor pendukung yang membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan investasi dapat direalisasikan.

Meskipun demikian, tingginya pertumbuhan investasi perlu dibaca secara hati-hati karena data historis menunjukkan adanya volatilitas/ketidakpastian yang cukup tinggi. Selain itu, apabila pertumbuhan investasi sangat dipengaruhi oleh realisasi ekspansi beberapa perusahaan berskala besar, terdapat risiko penurunan kinerja apabila proyek-proyek tersebut tidak berulang pada tahun berikutnya. Oleh karena itu, tantangan strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tidak hanya meningkatkan nilai realisasi investasi, tetapi juga membangun kesinambungan pertumbuhan melalui penguatan investment pipeline, diversifikasi sumber investasi, peningkatan kualitas informasi potensi investasi, serta pengawalan proyek investasi dari tahap minat sampai dengan realisasi.

2. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Pada Tahun 2025, target nilai realisasi investasi ditetapkan dalam rentang Rp1.598.000.000.000,00 sampai dengan Rp2.820.000.000.000,00, sedangkan realisasi mencapai Rp. 2.535.606.720.390,00. Dengan demikian, realisasi investasi berada dalam rentang target yang ditetapkan dan mendekati batas atas target dan menyisakan sekitar Rp284,39 miliar untuk mencapai batas atas target, sehingga secara kuantitatif sasaran ini dinilai tercapai dengan kinerja sangat baik.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal pada Tahun 2025 mampu menghasilkan outcome yang signifikan dalam bentuk peningkatan nilai investasi daerah.

Berdasarkan target Kementerian Investasi/BKPM

Berdasarkan target realisasi investasi yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebesar Rp 1,64 triliun, realisasi investasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 mencapai Rp 2,535 triliun atau sebesar 154,61% dari target yang ditetapkan atau lebih tinggi sekitar Rp895,61 miliar.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja realisasi investasi melampaui target secara signifikan dengan selisih lebih sebesar Rp895,61 miliar. Hal ini mengindikasikan bahwa daya tarik investasi daerah, efektivitas pelayanan perizinan berusaha, serta upaya promosi investasi telah berjalan dengan sangat baik.

Selain itu, Capaian ini menjadi evidence pembanding bahwa realisasi investasi Kabupaten Jombang berada pada posisi yang kuat. Namun, capaian tersebut tetap perlu dianalisis dari sisi sumber pembentuknya, terutama komposisi PMDN/PMA, investasi baru dan ekspansi, sektor usaha serta kontribusi proyek-proyek besar, agar pemerintah daerah dapat mengetahui struktur pertumbuhan investasi dan tingkat keberlanjutannya.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Pada Tahun 2025, target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebesar 91, sedangkan realisasi mencapai 91,72. Dengan demikian, capaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan, sehingga secara kuantitatif kinerja sasaran dinilai tercapai dengan kategori sangat baik.

Capaian IKM tersebut menunjukkan bahwa interaksi pengguna dengan layanan perizinan dan nonperizinan telah menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi. Faktor pendukung yang relevan antara lain peningkatan ketepatan waktu layanan, pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas petugas, serta fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha. Namun demikian, nilai IKM yang tinggi tidak berarti seluruh aspek pelayanan telah optimal. Karena IKM merupakan indikator agregat, diperlukan analisis lebih lanjut terhadap setiap unsur pelayanan untuk mengetahui aspek yang masih menjadi sumber ketidakpuasan. Tantangan selanjutnya adalah mempertahankan kualitas pelayanan ketika volume dan kompleksitas layanan meningkat serta memastikan hasil survei kepuasan benar-benar digunakan sebagai dasar penetapan tindakan perbaikan.

c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif

Pada Tahun 2025, target Nilai Reformasi Birokrasi ditetapkan sebesar 80,25, sedangkan realisasi mencapai 80,52. Dengan demikian, indikator ini melampaui target tahunan, sehingga secara kuantitatif sasaran dinilai tercapai. Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi upaya perbaikan tata kelola birokrasi, khususnya dalam penguatan sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas.

Meskipun target tahunan telah tercapai, peningkatan indeks yang relatif gradual (bertahap, konsisten, stabil dan dapat diprediksi) menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sistem, bukan hanya pemenuhan dokumen administratif. Area yang perlu terus diperkuat meliputi cascading kinerja sampai tingkat individu, pengukuran dan pelaporan berbasis outcome, pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian internal, manajemen risiko serta kualitas data kinerja. Dengan demikian, reformasi birokrasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi menghasilkan perbaikan nyata terhadap efektivitas pengelolaan kinerja organisasi

3. Program dan Indikator

Selanjutnya, indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan diselaraskan dan disesuaikan dengan dokumen Renstra DPMPTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029 guna memastikan kesinambungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah.

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan sebanyak 100% terealisasi sebesar 100%, Telah dilaksanakan updating peta potensi dan menyusun video profil untuk selanjutnya Melakukan monitoring evaluasi untuk mempersiapkan kinerja di tahun berikutnya.
- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 100% terealisasi sebesar 100%, Telah terlaksana kegiatan pameran APKASI Otonomi Expo 2025 dan Seminar Penanaman Modal dan Publikasi untuk selanjutnya Melakukan monitoring evaluasi untuk mempersiapkan kinerja di tahun berikutnya.

- c. Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 80% terealisasi sebesar 82,4 %. Terlaksana movev 206 pelaku usaha pada perusahaan Sampai dengan TB IV, dari target total sejumlah 250 pelaku usaha di Tahun 2025.
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP sebesar 85%, dapat terealisasi 95,76% karena Sampai dengan Tb IV Dari jumlah izin yang terbit 20310 izin (18853 izin berusaha 1457 izin non berusaha), 19449 izin (18109 izin berusaha + 1340 izin non berusaha) terbit sesuai standart pelayanan.
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan sebesar 23% terealisasi sebesar N/A karena Indikator pada PAK 2025 telah menyesuaikan pada RENSTRA 2025-2029 yaitu Persentase Pengguna Data Pelayanan Perizinan karena sudah tidak bisa menghitung pengguna yang puas pada sistem dikarenakan ada perubahan sistem dari KOMINFO. Sedangkan Jumlah pengguna Web Perijinan s.d TB IV = 39.740 pengguna, Pengguna offline s.d TB IV = 40 pengguna yang mana dengan indicator di Renstra terbaru tercapai 102%.
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 95% karena pada target Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor terdapat penyesuaian harga satuan pada tahun berjalan menyebabkan alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sepenuhnya mampu mendukung pencapaian target jumlah unit sebagaimana direncanakan.

3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu 2024 serta beberapa tahun sebelumnya 2023, ditunjukkan dalam table sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 3.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir (2024 dan 2023)

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	2023		TARGET	2024		TARGET	2025	
			REALISASI	% CAPAIAN		REALISASI	% CAPAIAN		REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	4,27%	5,05%		5,1%	-9,58%		3%	63,43%	
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	1400 (dalam Milyar Rp/ PMA dan PMDN)	1.715.913.003.483,-	122,57	1.900 (dalam Milyar Rp/ PMA-PMDN-IUMK)	2.114.861.515.725	111,31	Rp 1.598- s.d Rp 2.820. (dalam Milyar Rp/ PMA- PMDN) * Target PK-P 2025	2.535.606.720.390	100%
					1.500 (dalam Milyar Rp/ PMA- PMDN)	1.551.492.847.519	103,43	Rp. 1.640 (dalam Milyar Rp/ PMA- PMDN) * Target dari Kementerian Investasi/BKPM untuk Kabupaten Jombang	2.535.606.720.390	154,61%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	100	1	1	100	-	-	-
	Prosentase Penambahan Investasi Baru	-	-	-	-	-	-	10%	N/A	N/A
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindakanlanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100	100%	100%	100	-	-	-
	Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk Di OSS	-	-	-	-	-	-	5%	N/A	N/A
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	117,65%	156,86	80%	275,79%	344,74	85%	80%	94,12%



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2023			2024			2025		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,85	89,94	100,10	89	91,08	102,34	91	91,72	100,79%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	92,32%	112,58	82%	95,38%	116,32	90%	95,76%	106,40%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	23,71%	103,09	23%	236,00%	1026,09	90%	102%	113,33%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	72,50	80,05	100,69%	80	80,25	100,25	80,25	80,52	100,34%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100	100%	100%	99,5	-	-	-
	Nilai Evaluasi Akip Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	80,25 Nilai	77,95 Nilai	97,13%



1. Tujuan**Meningkatkan Penanaman Modal Daerah**

Persentase Peningkatan Realisasi Investasi ditargetkan sebesar 3,00% dan terealisasi sebesar 63,43%, atau lebih tinggi 60,43 poin persentase dari target. Berdasarkan formulasi indikator, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan nilai realisasi investasi yang sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024. Apabila dilihat secara historis, pertumbuhan investasi mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 5,05% pada Tahun 2023, mengalami kontraksi sebesar -9,58% pada Tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 63,43% pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian Tahun 2025 merupakan akselerasi yang sangat kuat sekaligus pemulihan setelah penurunan pada Tahun 2024.

Namun, pola tersebut sekaligus menunjukkan adanya seberapa cepat dan seberapa besar nilai atau hasil dari suatu investasi naik dan turun dalam waktu tertentu (volatilitas) yang perlu dikendalikan. Peningkatan Tahun 2025 antara lain didukung oleh ekspansi dan pengembangan kapasitas produksi beberapa perusahaan, khususnya perusahaan PMA. Oleh karena itu, keberhasilan Tahun 2025 perlu dikonsolidasikan melalui penguatan investment pipeline, diversifikasi sumber dan sektor investasi, serta peningkatan fasilitasi terhadap investor eksisting dan calon investor.

Peningkatan tersebut antara lain didukung oleh adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan, antara lain PT Cheil Jedang Indonesia (Rp.455.953.690.709), PT Kingsway Investments Indonesia (Rp. 110.058.999.980), PT Yutoeco Technology Indonesia (Rp. 98.600.000.000), PT Indonesia Royal Paper (Rp. 56.526.910.000) dan PT Carimax Technology Indonesia (Rp. 47.789.978.560). Dengan demikian, pembentukan capaian investasi Tahun 2025 tidak hanya berasal dari masuknya investasi baru, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspansi dan pengembangan usaha yang telah beroperasi. Dari sisi intervensi pemerintah daerah, fasilitasi penanaman modal, kemudahan pelayanan perizinan, pendampingan pelaku usaha serta pengendalian pelaksanaan investasi merupakan faktor pendukung yang membantu menciptakan kondisi yang memungkinkan investasi dapat direalisasikan.

Sehingga dapat diketahui bahwa capaian Kinerja tujuan Meningkatkan Penanaman Modal Daerah Tahun 2025 menunjukkan pemulihan dan akselerasi yang sangat kuat setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2024. Namun demikian,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pola historis 2023–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi masih fluktuatif. Oleh karena itu, tantangan utama DPMPTSP pada periode berikutnya adalah mengubah pertumbuhan investasi yang bersifat akseleratif menjadi pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan melalui diversifikasi sumber investasi, penguatan pipeline investasi, pengawalan realisasi investasi, serta peningkatan fasilitasi terhadap investor eksisting maupun calon investor.

2. Sasaran Staretgis**a. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah**

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai realisasi investasi menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada Tahun 2023, realisasi investasi sebesar Rp. 1,715 triliun, telah melampaui target Rp1,4 triliun. Pada Tahun 2024, realisasi investasi mencapai Rp1,551 triliun, sedikit di atas target Rp1,5 triliun, meskipun laju peningkatan investasi pada tahun tersebut relatif melambat.

Selanjutnya pada Tahun 2025, nilai realisasi investasi meningkat secara signifikan menjadi Rp2,535 triliun, dengan peningkatan sebesar sekitar Rp984,11 miliar dibandingkan Tahun 2024, ,menunjukkan adanya akselerasi investasi daerah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan perbaikan kinerja sasaran secara kuantitatif, namun perlu dicermati bahwa peningkatan yang signifikan tersebut juga berpotensi dipengaruhi oleh masuknya investasi berskala besar, sehingga keberlanjutan peningkatan nilai investasi perlu dijaga melalui diversifikasi sumber dan sektor investasi. Kenaikan nilai realisasi investasi di tahun 2025 meningkat pesat dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi oleh beberapa perusahaan yang di domonimasi PMA antara lain PT Cheil Jedang Indonesia (Rp.455.953.690.709), PT Kingsway Investments Indonesia (Rp.110.058.999.980), PT Yutoeco Technology Indonesia (Rp. 98.600.000.000), PT Indonesia Royal Paper (Rp. 56.526.910.000) dan PT Carimax Technology Indonesia (Rp. 47.789.978.560). Namun, karena kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh ekspansi beberapa perusahaan berskala besar, diperlukan strategi untuk menjaga keberlanjutan dan mengurangi risiko konsentrasi investasi. Dengan demikian, indikator investasi perlu didukung oleh pengukuran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang lebih rinci mengenai pipeline investasi, investasi baru, ekspansi, sektor usaha, PMDN/PMA dan keberhasilan fasilitasi proyek sampai dengan realisasi.

Sehingga dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah menunjukkan kinerja sangat kuat pada Tahun 2025, ditandai dengan realisasi Rp2,536 triliun atau meningkat sekitar Rp984,11 miliar dibandingkan Tahun 2024. Meskipun demikian, tren dua tahun sebelumnya menunjukkan bahwa nilai investasi masih memiliki risiko fluktuasi. Oleh karena itu, keberhasilan Tahun 2025 perlu dikonsolidasikan melalui penguatan investor retention, fasilitasi ekspansi investor eksisting, diversifikasi sektor investasi, serta pengembangan investment pipeline untuk memastikan pertumbuhan investasi tidak bergantung pada realisasi beberapa proyek besar.

Sedangkan kalau berdasarkan target realisasi investasi Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp1,64 triliun, realisasi Kabupaten Jombang sebesar Rp2,535 triliun mencapai sekitar 154,61% dari target tersebut, atau lebih tinggi sekitar Rp895,61 miliar. Capaian ini menjadi evidence pembandingan bahwa realisasi investasi Kabupaten Jombang berada pada posisi yang kuat. Namun, capaian tersebut tetap perlu dianalisis dari sisi sumber pembentuknya, terutama komposisi PMDN/PMA, investasi baru dan ekspansi, sektor usaha serta kontribusi proyek-proyek besar, agar pemerintah daerah dapat mengetahui struktur pertumbuhan investasi dan tingkat keberlanjutannya.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, IKM meningkat secara konsisten dari 89,94 pada Tahun 2023 menjadi 91,08 pada Tahun 2024 dan 91,72 pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Namun, peningkatan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 sebesar 0,64 poin lebih moderat dibandingkan peningkatan 1,14 poin pada periode sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah berada pada tingkat tinggi sehingga peningkatan berikutnya membutuhkan pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan unsur pelayanan dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, hasil IKM perlu dimanfaatkan sebagai dasar penetapan prioritas perbaikan layanan, terutama pada unsur yang masih memberikan kontribusi terhadap ketidakpuasan pengguna. Tantangan selanjutnya adalah mempertahankan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

kualitas pelayanan ketika volume dan kompleksitas layanan meningkat serta memastikan hasil survei kepuasan benar-benar digunakan sebagai dasar penetapan tindakan perbaikan

c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif

Pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai 80,52 dari target 80,25, atau lebih tinggi 0,27 poin dengan tingkat capaian sekitar 100,34%. Nilai tersebut meningkat dari 80,05 pada Tahun 2023 dan 80,25 pada Tahun 2024. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan secara bertahap dalam implementasi reformasi birokrasi.

Meskipun target tahunan telah tercapai, peningkatan indeks yang relatif gradual menunjukkan bahwa penguatan tata kelola perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sistem, bukan hanya pemenuhan dokumen administratif. Area yang perlu terus diperkuat meliputi cascading kinerja sampai tingkat individu, pengukuran dan pelaporan berbasis outcome, pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian internal, manajemen risiko serta kualitas data kinerja. Dengan demikian, reformasi birokrasi diharapkan tidak berhenti pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi menghasilkan perbaikan nyata terhadap efektivitas pengelolaan kinerja organisasi.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Berikut realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Perubahan Renstra 2025-2029, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Target Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3,55%	63,43%	1.786,20%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Akhir RPJMD 2025-2029	Realisasi PK 2025	Tingkat Kemajuan (%)
Sasaran Strategis:				
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	1.885. s.d. 2.850 (Milyar rupiah)	2.535.606.720.390	88,97%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,50	91,72	100,24%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	81	80,52	99,41%

1. Tujuan Perangkat Daerah**Meningkatkan Penanaman Modal Daerah**

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2025 sebesar 63,43% dibentuk oleh perubahan nilai realisasi investasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi investasi Tahun 2024. Secara nominal, realisasi investasi meningkat dari Rp1,551 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp2,536 triliun pada Tahun 2025, atau bertambah sekitar Rp984,11 miliar. Dengan demikian, capaian persentase peningkatan investasi tersebut memiliki basis peningkatan nilai investasi yang material. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 73,01 poin persentase, dari -9,58% pada Tahun 2024 menjadi 63,43% pada Tahun 2025, setelah pada Tahun 2023 realisasi pertumbuhan mencapai 5,05%.

Faktor pendorong utama adalah peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan, terutama perusahaan yang didominasi PMA, antara lain PT Cheil Jedang Indonesia, PT Kingsway Investments Indonesia, PT Yutoeco Technology Indonesia, PT Indonesia Royal Paper dan PT Carimax Technology Indonesia. Selain itu, fasilitasi penanaman modal, pelayanan perizinan, serta pendampingan pelaku usaha menjadi faktor pendukung yang memungkinkan proses investasi dapat berjalan dan direalisasikan.

Namun capaian masih menghadapi bottleneck berupa fluktuasi pertumbuhan investasi yang cukup tinggi, yang tercermin dari pola 5,05% pada 2023, -9,58% pada 2024 dan 63,43% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi belum sepenuhnya stabil dan terdapat risiko ketergantungan terhadap realisasi ekspansi beberapa perusahaan/proyek besar.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Data yang tersedia juga belum menunjukkan secara rinci kesinambungan *investment pipeline* dari tahap potensi, minat, komitmen sampai realisasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan efektif dalam mendukung terjadinya pemulihan dan akselerasi realisasi investasi pada Tahun 2025, terutama melalui fasilitasi dan pelayanan terhadap pelaku usaha. Namun, masih memerlukan penguatan pada keberlanjutan pertumbuhan, diversifikasi sumber investasi, serta kemampuan mengendalikan dan memprediksi pipeline investasi.

Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada penguatan investment pipeline, peningkatan investor retention dan fasilitasi ekspansi investor eksisting, pemetaan proyek investasi prioritas, serta monitoring tahapan investasi sampai terealisasi, dengan ukuran keberhasilan berupa persentase proyek investasi prioritas yang memiliki data pipeline terbaru dan ditindaklanjuti serta persentase permasalahan investasi yang berhasil difasilitasi sampai penyelesaiannya

2. Sasaran Strategis**a. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah**

Realisasi indikator Realisasi Investasi Daerah Tahun 2025 sebesar Rp2.535.606.720.390 dibentuk oleh nilai investasi yang berhasil terealisasi selama Tahun 2025 dari investasi baru maupun pengembangan/ekspansi kegiatan usaha yang telah berjalan. Realisasi tersebut berada dalam rentang target akhir RPJMD sebesar Rp1,885 triliun sampai dengan Rp2,850 triliun dan mencapai sekitar 88,97% dari batas atas target jangka menengah. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar sekitar Rp984,11 miliar atau 63,43%, dari Rp1,551 triliun pada Tahun 2024 menjadi Rp2,536 triliun pada Tahun 2025.

Faktor pendorong utama adalah realisasi peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan yang didominasi PMA, disertai dukungan fasilitasi penanaman modal, pelayanan perizinan, pendampingan pelaku usaha dan pemantauan pelaksanaan investasi. Faktor tersebut mendukung konversi kegiatan investasi dari tahap perencanaan/pengembangan usaha menjadi realisasi yang tercatat sebagai nilai investasi daerah.

Namun capaian masih menghadapi bottleneck berupa konsentrasi kontribusi pada investasi/perusahaan tertentu, potensi hambatan investasi lintas sektor, serta belum optimalnya pengukuran tahapan investment pipeline. Kondisi tersebut

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menimbulkan risiko bahwa apabila ekspansi perusahaan besar tidak berulang pada periode berikutnya, nilai realisasi investasi agregat dapat kembali mengalami fluktuasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan efektif dalam mendukung realisasi investasi bernilai besar dan mempercepat konversi sebagian proyek menjadi investasi aktual, tetapi masih memerlukan penguatan pada diversifikasi investor dan sektor, pengawalan proyek sejak tahap awal, serta penyelesaian hambatan investasi secara lebih terstruktur.

Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada pengembangan sistem monitoring proyek investasi prioritas, pemetaan potensi ekspansi investor eksisting, penguatan investment matching, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan lintas sektor, dengan ukuran keberhasilan berupa persentase proyek investasi prioritas yang termonitor sesuai tahapan, jumlah proyek yang memperoleh fasilitasi penyelesaian hambatan, serta nilai investasi dari proyek yang berhasil dikawal sampai tahap realisasi.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Realisasi indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 sebesar 91,72 dibentuk oleh persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mencakup berbagai aspek pelayanan, seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi dan perilaku petugas, sarana pelayanan serta penanganan pengaduan. Realisasi Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 91,50, dengan tingkat kemajuan yang tercantum dalam tabel sebesar 100,24%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 0,64 poin, dari 91,08 pada Tahun 2024 menjadi 91,72 pada Tahun 2025, setelah sebelumnya meningkat 1,14 poin dari 89,94 pada Tahun 2023 menjadi 91,08 pada Tahun 2024.

Faktor pendorong utama adalah perbaikan kualitas dan kepastian pelayanan, pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik, peningkatan kapasitas petugas, serta pendampingan pengguna layanan. Tren IKM yang meningkat dalam tiga tahun menunjukkan bahwa proses perbaikan pelayanan telah memberikan hasil positif terhadap persepsi pengguna.

Namun capaian masih menghadapi bottleneck berupa nilai IKM yang bersifat agregat sehingga belum secara langsung menunjukkan unsur pelayanan yang masih

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menjadi sumber ketidakpuasan, serta potensi keterbatasan kapasitas SDM dalam menghadapi peningkatan volume dan kompleksitas layanan. Selain itu, sebagian proses perizinan bersifat lintas sektor sehingga pengalaman pengguna tidak seluruhnya ditentukan oleh DPMPSTP.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara umum dan mempertahankan tingkat kepuasan pengguna pada level tinggi, tetapi masih memerlukan penguatan pada identifikasi titik lemah pelayanan secara lebih spesifik dan pemanfaatan hasil survei sebagai dasar tindakan korektif.

Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada analisis unsur pembentuk IKM secara periodik, penetapan unsur pelayanan prioritas yang memerlukan perbaikan, penguatan mekanisme penanganan pengaduan dan service recovery, serta peningkatan kapasitas pelayanan digital dan SDM, dengan ukuran keberhasilan berupa persentase unsur pelayanan prioritas yang memiliki corrective action dan persentase tindak lanjut perbaikan yang diselesaikan.

c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 80,52 dibentuk oleh kualitas implementasi tata kelola dan manajemen kinerja perangkat daerah, antara lain melalui perencanaan kinerja, cascading, pengukuran, monitoring dan evaluasi, pengendalian, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Realisasi tersebut telah melampaui target Tahun 2025 sebesar 80,25, tetapi masih berada sedikit di bawah target akhir RPJMD sebesar 81, dengan tingkat kemajuan 99,41% dan gap sebesar 0,48 poin. Dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 0,27 poin, dari 80,25 pada Tahun 2024 menjadi 80,52 pada Tahun 2025, melanjutkan peningkatan dari 80,05 pada Tahun 2023.

Faktor pendorong utama adalah konsistensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penguatan implementasi SAKIP, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi perbaikan kinerja. Tren peningkatan 80,05 → 80,25 → 80,52 menunjukkan bahwa penguatan tata kelola telah berjalan secara konsisten.

Namun capaian masih menghadapi bottleneck berupa masih adanya ruang penguatan pada kualitas cascading kinerja, orientasi outcome, pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi, kualitas data kinerja, manajemen risiko dan pengendalian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

internal. Hal tersebut tercermin dari capaian yang meningkat secara gradual, namun belum mencapai target akhir RPJMD.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi yang telah dilakukan efektif dalam membangun dan mempertahankan peningkatan tata kelola serta akuntabilitas kinerja secara bertahap, tetapi masih memerlukan penguatan pada kematangan sistem manajemen kinerja agar hasil evaluasi benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan korektif.

Oleh karena itu, tindak lanjut diarahkan pada penguatan cascading kinerja sampai tingkat individu, integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja, peningkatan kualitas pengukuran outcome, penguatan pemanfaatan hasil monev, serta penyediaan evidence kinerja yang lebih terintegrasi, dengan ukuran keberhasilan berupa persentase indikator yang memiliki data dukung tervalidasi, persentase rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti, serta persentase indikator yang mengalami deviasi dan telah memiliki corrective action yang terdokumentasi

3.1.4. Perbandingan Realisasi antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Berikut realisasi kinerja DPMPSTP Kabupaten Jombang Tahun 2025 dibandingkan dengan Realisasi kinerja di level provinsi/nasional ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Realisasi Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	63,43%	0,3%	12,7%
Sasaran Strategis:					
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	a	Realisasi Investasi Daerah	2.535.606.720.390	147,7 T	1.931,2 T

Realisasi investasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar Rp2.535.606.720.390 menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja yang cukup

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tinggi, tercermin dari capaian indikator persentase peningkatan sebesar 63,43%. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi investasi Provinsi Jawa Timur sebesar Rp147,7 triliun dan nasional sebesar Rp1.931,2 triliun, terlihat bahwa kontribusi Kabupaten Jombang masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 1,72% terhadap provinsi dan 0,13% terhadap nasional.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan (growth) dan skala (scale), di mana Kabupaten Jombang mampu mencatatkan peningkatan kinerja yang tinggi secara persentase, namun belum diikuti dengan peningkatan nilai investasi yang signifikan. Dengan kata lain, pertumbuhan yang tinggi masih terjadi pada basis investasi yang relatif kecil (*low base effect*), sehingga dampaknya terhadap kontribusi regional dan nasional masih terbatas.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Jombang dalam peta investasi masih berada pada kategori daerah pendukung (supporting region) dengan skala investasi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan daerah-daerah pusat industri di Jawa Timur. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum optimalnya ketersediaan kawasan industri skala besar, keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, serta dominasi investasi pada sektor usaha skala kecil dan menengah.

Meskipun demikian, capaian realisasi investasi Kabupaten Jombang Tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang positif, yang mencerminkan adanya stabilitas iklim investasi serta kepercayaan investor, khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendorong peningkatan investasi pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, capaian persentase yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat potensi akselerasi investasi yang cukup besar apabila didukung dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada upaya transformasi dari pertumbuhan berbasis kuantitas menuju peningkatan kualitas dan skala investasi, antara lain melalui:

- pengembangan kawasan strategis dan klaster industri berbasis potensi lokal (hilirisasi),
- peningkatan kemudahan dan kepastian perizinan melalui optimalisasi OSS-RBA,
- penguatan promosi investasi yang lebih terarah (targeted investment),
- serta percepatan penyelesaian hambatan investasi secara terintegrasi lintas sektor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan strategi tersebut, diharapkan Kabupaten Jombang tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan kinerja investasi, tetapi juga meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah, provinsi, dan nasional.

Tabel 3.1.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten dan Provinsi

Tujuan/Sasaran	No.	Indikator	Realisasi DPMPTSP	Realisasi Kabupaten Jombang 2025	Realisasi Jawa Timur 2025	Realisasi Nasional 2025
Sasaran Strategis:						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,72	91,99	90,31	-
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	c	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,52	<i>Belum rilis</i>	<i>Belum rilis</i>	-

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebesar 91,72 menunjukkan kinerja pelayanan yang sangat baik dan berada pada kategori prima. Nilai ini sedikit di bawah capaian agregat Kabupaten Jombang sebesar 91,99, namun masih lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 90,31.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara kualitas layanan, DPMPTSP telah mampu melampaui standar pelayanan di tingkat provinsi, namun kontribusinya terhadap capaian kabupaten belum sepenuhnya optimal. Selisih dengan capaian kabupaten menunjukkan adanya gap tipis (0,27 poin) yang menandakan bahwa sektor pelayanan perizinan belum menjadi kontributor dominan dalam mendorong kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif kinerja, capaian yang tinggi ini juga perlu dicermati sebagai indikasi zona nyaman (*comfort zone*), di mana peningkatan nilai menjadi semakin sulit karena sudah berada pada level atas (*ceiling effect*). Dengan demikian, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan capaian, tetapi juga melakukan lompatan kualitas layanan (*service excellence transformation*).

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara substantif, masih terdapat beberapa area yang berpotensi menjadi faktor pembatas peningkatan IKM, antara lain:

- konsistensi standar pelayanan antar jenis layanan,
- kecepatan penyelesaian layanan yang belum seragam,
- serta pengalaman pengguna layanan (*user experience*) yang belum sepenuhnya terdigitalisasi dan terintegrasi.

Oleh karena itu, arah kebijakan ke depan perlu difokuskan pada:

- penguatan digitalisasi layanan end-to-end berbasis OSS dan sistem pelayanan terintegrasi,
- peningkatan kualitas interaksi layanan melalui customer experience management,
- serta pengembangan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan transparansi.

Dengan strategi tersebut, diharapkan DPMPSTP Kabupaten Jombang tidak hanya mampu mempertahankan capaian kinerja yang tinggi, tetapi juga meningkatkan perannya sebagai leading sector dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Beberapa penyebab keberhasilan/kegagalan dan/atau kendala /permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang dalam pencapaian kinerja di tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

a. Faktor pendorong utama (*enablers*)

1. Ekspansi dan pengembangan kapasitas perusahaan
Lonjakan investasi 2025 terutama dipengaruhi peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan yang didominasi PMA. Ini merupakan enabler paling signifikan, karena secara langsung meningkatkan nilai investasi.
2. Investasi PMA berskala besar
Sejumlah perusahaan PMA berkontribusi terhadap peningkatan nilai investasi antara lain PT Cheil Jedang Indonesia, PT Kingsway Investments Indonesia, PT Yutoeco Technology Indonesia, PT Indonesia Royal Paper dan PT Carimax Technology Indonesia.
3. Pendampingan dan pengendalian pelaku usaha

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Optimalisasi pendampingan LKPM/OSS membantu DPMPSTP mengetahui perkembangan investasi dan mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kemungkinan meningkatkan realisasi investasi.

4. **Fasilitasi dan pelayanan perizinan**

Pelayanan yang semakin baik menciptakan lingkungan administratif yang mendukung realisasi proyek

5. **Koordinasi Intensif Lintas Perangkat Daerah dan Instansi Terkait**

Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian kendala nonperizinan. Kegiatan ini mendukung terciptanya kepastian berusaha dan meningkatkan kepercayaan investor.

6. **Promosi Potensi Investasi Daerah**

Kegiatan promosi investasi, baik melalui forum, penyediaan materi promosi, maupun komunikasi langsung dengan calon investor, telah memperluas akses informasi mengenai potensi unggulan Kabupaten Jombang. Meskipun tidak seluruh kegiatan promosi menghasilkan investasi secara langsung, kegiatan ini berfungsi sebagai enabler bagi masuknya investasi pada Tahun 2025.

7. **Pelayanan berbasis elektronik dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem OSS dan Si RINDU NONA.**

Optimalisasi penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Perizinan Terpadu Non Berusaha (SI Rindu Nona) dalam pelayanan perizinan telah meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses perizinan usaha. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas dan terealisasinya investasi.

8. **Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.**

Pelaksanaan kegiatan monitoring realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal dilakukan secara berkala. Kegiatan ini memastikan bahwa komitmen investasi yang telah diberikan benar-benar direalisasikan dan tercatat secara akurat.

9. **Peningkatan Standar dan Prosedur Pelayanan.**

Penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang konsisten sepanjang Tahun 2025 telah meningkatkan kepastian layanan dan menurunkan potensi keluhan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**10. Pelaksanaan Inovasi Pelayanan PINTER NGAJI.**

Inovasi PINTER NGAJI (Pelayanan Perizinan Terpadu Langsung Jadi) merupakan kegiatan riil jemput bola yang dilaksanakan di kecamatan dan desa. Kegiatan ini secara langsung meningkatkan akses layanan perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM, serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKM.

11. Implementasi Reformasi Birokrasi dan penguatan SAKIP.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan SAKIP dilakukan secara konsisten melalui penyusunan perencanaan kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

12. Monitoring dan Evaluasi Internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala mendorong kepatuhan terhadap ketentuan dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola organisasi.

b. Faktor penghambat (*bottleneck*)**1. Ketergantungan terhadap Investor Skala Besar (PMA)**

Capaian peningkatan investasi yang sangat tinggi pada Tahun 2025 sebagian besar ditopang oleh ekspansi / perluasan beberapa perusahaan besar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan terhadap investor tertentu, sehingga apabila terjadi penurunan atau relokasi investasi, maka capaian kinerja berpotensi mengalami fluktuasi yang signifikan.

2. Volatilitas pertumbuhan investasi menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi belum stabil. Ini merupakan bottleneck paling jelas dari data historis. Kinerja yang sangat tinggi pada 2025 belum otomatis berarti pertumbuhan akan berulang.**3. Konsentrasi pertumbuhan pada perusahaan/proyek tertentu.**

Bila lonjakan nilai terutama berasal dari beberapa perusahaan besar, struktur pertumbuhan menjadi lebih rentan terhadap penundaan atau perubahan rencana ekspansi perusahaan tersebut.

4. Fluktuasi Iklim Investasi yang Dipengaruhi Faktor Eksternal

Perubahan kondisi ekonomi makro, kebijakan pusat, serta dinamika global berpengaruh terhadap minat investasi. Faktor ini berada di luar kendali

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

perangkat daerah dan berpotensi menghambat pencapaian target apabila tidak diantisipasi melalui strategi mitigasi yang memadai.

5. Keterbatasan Diversifikasi Sektor Investasi

Sebaran investasi yang belum merata pada berbagai sektor menyebabkan ketahanan investasi daerah masih relatif rendah. Sektor tertentu menjadi dominan, sementara sektor potensial lainnya belum berkembang optimal.

6. Keterbatasan Data dan Informasi Potensi Investasi

Belum optimalnya integrasi dan pemutakhiran data potensi investasi daerah menghambat penyusunan strategi promosi yang berbasis bukti (evidence-based), sehingga peluang investasi belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

7. Potensi Stagnasi Nilai IKM

Nilai IKM yang telah berada pada kategori sangat baik (di atas 91) berpotensi mengalami stagnasi, karena ruang peningkatan skor semakin terbatas. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga tren peningkatan kinerja pelayanan.

8. Pemanfaatan Hasil Survei IKM Belum Optimal

Hasil survei IKM belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan layanan yang spesifik dan terukur, sehingga peningkatan kualitas pelayanan belum sepenuhnya berbasis pada analisis kebutuhan pengguna.

9. Ketergantungan pada Sistem Digital

Digitalisasi layanan memberikan kemudahan, namun juga menimbulkan risiko apabila terjadi gangguan sistem atau keterbatasan literasi digital masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil.

10. Internalisasi Reformasi Birokrasi yang Belum Merata

Pemahaman dan implementasi Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya merata pada seluruh unit kerja, sehingga capaian kinerja masih bersifat parsial dan belum optimal secara menyeluruh.

11. Peningkatan Nilai RB yang Bersifat Incremental

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi cenderung bersifat bertahap (incremental), sehingga membutuhkan upaya yang lebih sistematis dan inovatif untuk mencapai target yang lebih tinggi.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025. Total Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 setelah P APBD sebesar Rp. 10.215.246.317,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 9.448.722.630,- atau 92,50%.

Alokasi anggaran setiap sasaran kinerja (strategis) dan Program pada tahun 2025 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025(%)
TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%	63,43%	2114,34%	10.215.246.317	9.448.722.630	92,50
Sasaran Strategis:								
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	a	Realisasi Investasi Daerah	1.598 s.d 2.820 Milyar rupiah	2.535.606.720.390	100%	830.144.230	793.378.238	95,57
Program promosi penanaman modal		Prosentase jenis usaha baru yang masuk di oss	10%	10%	100%	423.471.130	404.066.184	95,42 %
Program pengembangan iklim penanaman modal		Prosentase penambahan investasi baru	5%	5%	100%	248.331.850	231.304.396	93,14 %

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target Kinerja 2025	Realisasi Kinerja 2025	Capaian Kinerja 2025 (%)	Anggaran 2025	Realisasi Anggaran 2025	Capaian Anggaran 2025 (%)
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	85%	80%	94,12%	158.341.250	158.007.658	99,79 %
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91,72	100,79%	291.296.200	289.425.374	99,36 %
Program pelayanan penanaman modal		Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai sop	90%	95,76%	106,40%	186.365.950	185.519.605	99,55 %
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		Persentase pengguna data pelayanan perizinan	90%	102%	113,33%	104.930.250	103.905.769	99,02 %
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	c	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,25	80,52	100,34%	9.093.805.887	8.365.919.018	92 %
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Nilai evaluasi akip perangkat daerah	80,25 Nilai	77,95 Nilai	97,13%	9.093.805.887	8.365.919.018	92 %

Berdasarkan tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran diatas, maka :

1. Tujuan Perangkat Daerah

Meningkatkan Penanaman Modal Daerah

Pada Tahun 2025, capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi mencapai 2114,34%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh realisasi anggaran sebesar Rp. 9.448.722.630 dari pagu Rp10.215.246.317 atau 92,50%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa:

- Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, karena capaian kinerja yang sangat tinggi diperoleh dengan tingkat penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Output dan outcome yang dihasilkan tidak berbanding lurus secara linier dengan besaran anggaran, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal positif seperti iklim investasi, kebijakan pusat, serta kepercayaan investor.
- Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menjadi leverage (pengungkit) bagi masuknya investasi tanpa membutuhkan tambahan anggaran yang signifikan.

Dengan demikian, dari perspektif pengawasan kinerja, pelaksanaan tujuan ini dapat dikategorikan efisien dan sangat efektif.

2. Sasaran Strategis**a. Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah**

Capaian kinerja indikator Realisasi Investasi Daerah mencapai 100%, dengan realisasi anggaran Rp793.378.238 dari pagu Rp830.144.230 atau 95,57%.

Ditinjau dari struktur program pendukung:

- Program Promosi Penanaman Modal menunjukkan capaian kinerja 100% dengan serapan anggaran 95,42%.
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal mencapai kinerja 100% dengan serapan 93,14%.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencapai kinerja 94,12% dengan serapan 99,79%.

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa:

- Seluruh program mencapai target kinerja dengan realisasi anggaran di bawah pagu, menandakan efisiensi teknis dan operasional.
- Kinerja maksimal dapat dicapai melalui penguatan koordinasi, pemanfaatan sistem OSS, dan optimalisasi fungsi pengendalian, Secara keseluruhan, Sasaran ini menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Capaian kinerja IKM Tahun 2025 mencapai 100,79%, dengan realisasi anggaran Rp289.425.374 dari pagu Rp291.296.200 atau 99,36%. Ditinjau dari program pendukung:

- Program pelayanan penanaman modal mencapai kinerja 100% dengan serapan 99,55%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mencapai kinerja 100% dengan serapan 99,02%.

Analisis efisiensi menunjukkan bahwa:

- Tingginya nilai IKM dicapai dengan penggunaan anggaran yang sangat terkendali dan proporsional.
- Hampir seluruh anggaran digunakan langsung untuk aktivitas yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan (front office dan sistem layanan).
- Tidak terdapat indikasi inefisiensi struktural, karena peningkatan kepuasan masyarakat sejalan dengan realisasi anggaran yang rasional.

Dengan demikian, Sasaran ini mencerminkan efisiensi fungsional dan dampak langsung terhadap kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Capaian kinerja Indeks RB Perangkat Daerah mencapai 100,34%, dengan realisasi anggaran Rp8.365.919.018 dari pagu Rp9.093.805.887 atau 92%. Analisis efisiensi menunjukkan bahwa:

- Capaian Indeks RB yang melampaui target diperoleh dengan serapan anggaran yang relatif moderat, sehingga menunjukkan efisiensi yang baik.
- Peningkatan nilai RB tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kelengkapan eviden, serta konsistensi implementasi kebijakan internal.

Sasaran ini dapat dikategorikan efisien dan berkelanjutan, karena perbaikan tata kelola dicapai tanpa ketergantungan pada peningkatan belanja

3.2.2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**1. Keterkaitan Program/Kegiatan Dengan Tujuan****a. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Tujuan Meningkatkan Penanaman Modal Daerah pada Tahun 2025, yang tercermin dari lonjakan persentase peningkatan realisasi investasi dan meningkatnya nilai realisasi investasi, tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan riil sebagai berikut:

- Fasilitasi dan Pendampingan Investor Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP secara aktif melakukan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan besar, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mulai dari tahap perizinan, pemenuhan komitmen OSS, hingga pengembangan kapasitas produksi. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap realisasi investasi berskala besar yang menjadi faktor utama peningkatan nilai investasi daerah.

- Koordinasi Intensif Lintas Perangkat Daerah dan Instansi Terkait
Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya dilakukan secara berkelanjutan untuk mempercepat penyelesaian kendala nonperizinan. Kegiatan ini mendukung terciptanya kepastian berusaha dan meningkatkan kepercayaan investor.
- Promosi Potensi Investasi Daerah
Kegiatan promosi investasi, baik melalui forum, penyediaan materi promosi, maupun komunikasi langsung dengan calon investor, telah memperluas akses informasi mengenai potensi unggulan Kabupaten Jombang. Meskipun tidak seluruh kegiatan promosi menghasilkan investasi secara langsung, kegiatan ini berfungsi sebagai enabler bagi masuknya investasi pada Tahun 2025.

b. Program dan Kegiatan yang Masih Memerlukan Penguatan

Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, Inspektorat mencermati bahwa sebagian kegiatan promosi investasi belum sepenuhnya didukung dengan pengukuran dampak (outcome) yang terstruktur. Selain itu, kegiatan fasilitasi masih relatif terfokus pada investor berskala besar, sehingga kontribusi investor kecil dan menengah terhadap peningkatan investasi daerah masih perlu ditingkatkan.

2. Keterkaitan Program/Kegiatan Dengan Sasaran

➤ **Sasaran : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah**

a. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem OSS
Optimalisasi penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan telah meningkatkan kemudahan dan kecepatan proses perizinan usaha. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas dan terealisasinya investasi.

- **Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
Pelaksanaan kegiatan monitoring realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal dilakukan secara berkala. Kegiatan ini memastikan bahwa komitmen investasi yang telah diberikan benar-benar direalisasikan dan tercatat secara akurat.
- **Pendampingan Perizinan dan Nonperizinan**
Pendampingan aktif kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam proses perizinan dan pemenuhan persyaratan administrasi telah mendorong peningkatan realisasi investasi skala kecil dan menengah.

b. Kegiatan yang Berpotensi Menghambat atau Kurang Optimal

Kegiatan pengendalian dan monitoring investasi masih menghadapi keterbatasan dalam hal integrasi data lintas sektor, sehingga potensi investasi yang belum terealisasi secara optimal belum seluruhnya dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.

➤ **Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

a. Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

- **Peningkatan Standar dan Prosedur Pelayanan**
Penyusunan dan penerapan standar pelayanan serta SOP yang konsisten sepanjang Tahun 2025 telah meningkatkan kepastian layanan dan menurunkan potensi keluhan masyarakat.
- **Pelaksanaan Inovasi Pelayanan PINTER NGAJI**
Inovasi PINTER NGAJI (Pelayanan Perizinan Terpadu Langsung Jadi) merupakan kegiatan riil jemput bola yang dilaksanakan di kecamatan dan desa. Kegiatan ini secara langsung meningkatkan akses layanan perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM, serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai IKM.
- **Digitalisasi dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan**
Penguatan sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dan memantau proses perizinan secara transparan.

b. Kegiatan yang Masih Memerlukan Perbaikan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meskipun nilai IKM telah berada pada kategori sangat baik, kegiatan tindak lanjut hasil survei IKM masih perlu diperdalam agar perbaikan pelayanan lebih terfokus pada unsur pelayanan yang memiliki nilai relatif lebih rendah.

➤ **Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif**

a. **Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

- **Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penguatan SAKIP dilakukan secara konsisten melalui penyusunan perencanaan kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal. Kegiatan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

- **Penyempurnaan SOP dan Proses Bisnis**

Penataan proses bisnis dan penyempurnaan SOP telah meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- **Monitoring dan Evaluasi Internal**

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal secara berkala mendorong kepatuhan terhadap ketentuan dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola organisasi.

b. **Kegiatan yang Masih Memerlukan Penguatan**

Kegiatan internalisasi budaya kinerja dan manajemen risiko belum sepenuhnya merata pada seluruh unit kerja, sehingga peningkatan nilai Reformasi Birokrasi masih bersifat bertahap.

3. **Keterkaitan Dengan Tujuan Dan Sasaran Kabupaten**

Secara keseluruhan, program dan kegiatan DPMPTSP Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten, khususnya dalam:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja, diperlukan penguatan kegiatan yang bersifat strategis, terukur, dan berdampak jangka panjang.

3.2.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan. Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2025 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut terdapat semua program sudah mencapai efisiensi, bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2025 selain beberapa program telah mencapai efisiensi melampaui target beberapa telah mencapai efisiensi walaupun tidak mengalami penambahan yang signifikan. Berikut tabel pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya Keuangan/anggaran :

Tabel 3.2.2.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/ Anggaran

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
TUJUAN:				
Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	2114,34%	92,50%	2285,77%
Sasaran Strategis:				
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	100%	95,57%	104,64%
Program promosi penanaman modal	Prosentase jenis usaha baru yang masuk di oss	100%	95,42%	104,80%
Program pengembangan iklim penanaman modal	Prosentase penambahan investasi baru	100%	93,14%	107,37%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program pengendalian pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	100%	99,79%	100,21%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,79%	99,36%	101,44%
Program pelayanan penanaman modal	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai sop	100%	99,55%	100,45%
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengguna data pelayanan perizinan	100%	99,02%	100,99%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,34%	92%	109%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai evaluasi akip perangkat daerah	97,13%	92%	106%

Berdasarkan tabel 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas, maka :

Tujuan : Meningkatkan Penanaman Modal Daerah

Capaian kinerja sebesar 2114,34% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 92,50% Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 2285,77%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan sangat efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 2285,77% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *sangat efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran kinerja Meningkatnya Realisasi Investasi dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 95,57%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 104,64%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 104,64% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Program :

- ❑ Program promosi penanaman modal dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran program tersebut sebesar 95,42%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 104,80%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 104,80% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.
- ❑ Program pengembangan iklim penanaman modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran Program tersebut sebesar 93,14%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 107,37%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 107,37% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.
- ❑ Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung Program tersebut sebesar 99,79%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 100,21%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 100,21% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan

Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan target kinerja nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,79% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,36%. Sehingga dapat diketahui

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tingkat efisiensinya sebesar 101,44%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 101,44% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Program :

- ❑ Program Pelayanan Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,55%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 100,45%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 100,45% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.
- ❑ Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,02%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 100,99%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 100,99% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Sasaran 3 : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif

Sasaran kinerja Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,34% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 92%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 109%. Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 109% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Program :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 97,13% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 92% . Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 106% . Nilai ini > 100%, maka anggaran digunakan secara efisien. Artinya, efisiensi anggaran dalam menghasilkan capaian kinerja adalah 106% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan *efisien*. Semakin tinggi persentase efisiensi, semakin baik kinerja dalam memanfaatkan anggaran yang optimal.

Dalam rangka mencapai efisiensi anggaran tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melakukan berbagai strategi, antara lain sebagai berikut:

a. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan sistem informasi perizinan berbasis digital telah dioptimalkan, seperti OSS dan aplikasi SI RINDU NONA, dan layanan daring lainnya. Digitalisasi ini berdampak langsung pada efisiensi biaya operasional, mengurangi kebutuhan tatap muka, serta mempercepat waktu layanan.

b. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana yang Efektif

Seluruh sarana dan prasarana kantor dimanfaatkan secara maksimal melalui penjadwalan dan berbagi pakai antar unit kerja. Tidak dilakukan pengadaan baru apabila masih tersedia sarana eksisting yang layak pakai, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk kebutuhan prioritas lainnya.

c. Peningkatan Kapasitas SDM secara Internal

DPMPTSP memprioritaskan pengembangan kapasitas ASN melalui metode *in-house training*, mentoring, dan pelatihan daring, yang lebih hemat dibandingkan pelatihan eksternal. Strategi ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas pegawai.

d. Reprioritisasi Kegiatan dan Fokus pada Program Berdampak Tinggi

Kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung terhadap sasaran strategis telah dikurangi atau ditiadakan. DPMPTSP memfokuskan anggaran pada kegiatan prioritas, pendampingan/ fasilitasi permasalahan para pelaku usaha/ investor, dan percepatan layanan perizinan.

e. Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah dan Stakeholder

Pelaksanaan kegiatan strategis seperti forum investasi, promosi peluang usaha, dan koordinasi pengembangan kawasan industri dilakukan dengan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menggandeng perangkat daerah lain, asosiasi usaha, dan mitra swasta. Hal ini mendukung efisiensi biaya.

f. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja**

Pelaksanaan monitoring kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara produktif. Evaluasi difokuskan pada ketercapaian outcome, bukan hanya output, sehingga kegiatan yang tidak efektif dapat segera disesuaikan.

Dengan strategi-strategi tersebut, DPMPTSP telah mampu menjalankan prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dan capaian kinerja. Hasil ini menjadi bukti komitmen DPMPTSP dalam mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya Manusia yang tersedia.

Berikut tabel Kebutuhan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang :

Tabel 3.2.3.
Daftar Kebutuhan Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Jombang

No	Nama Jabatan	Status	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Kepala Dinas	PNS	1	0	0
2	Sekretaris Dinas	PNS	1	0	0
3	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	PNS	1	0	0
4	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	PNS	0	1	-1
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengendalian dan Pengawasan	PNS	1	0	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Jabatan	Status	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
6	Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi	PNS	1	0	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	PNS	1	0	0
8	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	PNS	1	0	0
9	Perencana Ahli Muda	PNS	1	0	0
10	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	PNS	0	1	-1
11	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	PNS	1	0	0
12	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha	PNS	1	0	0
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha	PNS	0	1	-1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	PNS	1	0	0
15	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan	PNS	0	1	-1
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Informasi	PNS	1	0	0
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan	PNS	1	0	0
18	Pengolah Data Dan Informasi	PNS	5	0	0
19	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS	5	0	0
20	Pengadministrasi perkantoran	PNS	5	0	0
21	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PNS	1	0	0
22	Arsiparis Ahli Pertama	PPPK Penuh Waktu	1	0	0
23	Pranata Komputer Terampil	PPPK Penuh Waktu	1	0	0
24	Pengadministrasi perkantoran	PPPK Penuh Waktu	1	0	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Jabatan	Status	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
25	Penata Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	6	0	0
26	Operator Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	4	0	0
TOTAL			42	4	-4

Berdasarkan tabel 3.2.4 tersebut, persediaan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025 sebanyak 42 pegawai yang terdiri dari 29 PNS, 3 PPPK Penuh Waktu, dan 10 PPPK Paruh Waktu. Sementara itu, kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebanyak 46 pegawai. Dengan demikian terdapat kekurangan 4 pegawai atau tingkat keterpenuhan formasi sebesar 91,30%.

Persentase keterpenuhan sebesar 91,30% menunjukkan bahwa secara kuantitatif kebutuhan SDM telah terpenuhi lebih dari sembilan puluh persen, sehingga secara umum kondisi ini masih dapat dikategorikan relatif ideal dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, kekurangan 4 pegawai tetap perlu menjadi perhatian, terutama apabila kekurangan tersebut berada pada jabatan fungsional teknis atau posisi strategis yang berpengaruh langsung terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Selain itu, komposisi pegawai yang terdiri dari PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu juga perlu dianalisis dari sisi efektivitas dan keberlanjutan kinerja. Keberadaan PPPK Paruh Waktu misalnya, meskipun membantu dalam pemenuhan kebutuhan kuantitatif, memiliki keterbatasan dari sisi jam kerja dan fleksibilitas tugas tertentu. Oleh karena itu, optimalisasi pembagian tugas, penataan ulang beban kerja, serta peningkatan kompetensi pegawai menjadi strategi penting untuk menjaga kualitas pelayanan tetap prima meskipun terdapat kekurangan formasi.

Ke depan, pemenuhan kebutuhan pegawai melalui mekanisme pengadaan ASN atau redistribusi pegawai antar perangkat daerah perlu dipertimbangkan, khususnya untuk jabatan yang memiliki beban kerja tinggi dan berdampak langsung terhadap indikator kinerja utama DPMPTSP. Dengan demikian, keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM dapat semakin mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan efisien.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Penggunaan Sumber Daya Sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan pendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut rencana kebutuhan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang pada tahun 2025 tersaji pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2.4.
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2025
Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

NO	URAIAN	P-RKBMD 2025		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	A.C. Split	21	21	0
2	Alat Kantor Lainnya	3	3	0
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2	2	0
4	Alat Pemadam/Portable	5	5	0
5	Alat Pemotong Kertas	1	1	0
6	Alat Penghancur Kertas	3	3	0
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	2	0
8	Amplifier	1	1	0
9	Audio Tape Reel Recorder	1	1	0
10	Bangku Tunggu	1	1	0
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	0
12	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1	1	0
13	Brandkas	1	1	0
14	Buku Umum Lain-lain	6	6	0
15	Camera Electronic	7	7	3
16	Compact Disc Player	1	1	0
17	Dispenser	1	1	1
18	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	0	0	0
19	Exhaust Fan	3	3	0
20	External	1	1	0
21	Facsimile	1	1	0
22	Filing Cabinet Besi	26	26	0
23	Filing Cabinet Kayu	1	1	0
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	0
25	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	1	0
26	Gordyin/Kray	1	1	0
27	Handy Cam	2	2	0
28	Handy Talky (HT)	6	6	0
29	Hard Disk	1	1	0
30	Hub	1	1	0
31	ILS. Calibration RX.	2	2	0
32	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	1	1	0
33	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1	1	0
34	Kaca Hias	1	1	0
35	Kipas Angin	2	2	0
36	Kitchen Set	0	0	0
37	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1	0
38	Kursi Besi/Metal	22	22	0
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	12	12	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN	P-RKBMD 2025		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	3	0
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	3	0
44	Kursi Putar	8	8	0
45	Kursi Rapat	72	72	0
46	Kursi Tamu	15	15	0
47	Lap Top	12	12	0
48	Layar Film/Projector	5	5	0
49	Lemari Besi/Metal	2	2	2
50	Lemari Es	1	1	0
51	Lemari Kaca	5	5	0
52	Lemari Kayu	14	14	0
53	Lukisan Cat Air	2	2	0
54	Majalah	0	0	0
55	Meja 1/2 Biro	31	31	0
56	Meja Bundar	0	0	0
57	Meja Kerja Kayu	14	14	0
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	3	0
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0
61	Meja Rapat	24	24	0
62	Meja Resepsionis	1	1	0
63	Meja Telepon	1	1	0
64	Mesin Absensi	2	2	0
65	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	1	0
66	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	1	0
67	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1	0
68	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	2	0
69	Mesin Pres	1	1	0
70	Meubeler lainnya	1	1	0
71	Microphone/Wireless MIC	1	1	0
72	Monitor	1	1	0
73	Network Interface External	5	5	0
74	Note Book	14	14	0
75	P.C Unit	45	45	11
76	Papan Nama Instansi	1	1	0
77	Papan Visual/Papan Nama	2	2	0
78	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
79	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	0
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	10	10	0
81	Perforator Besar	2	2	0
82	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	0	0	0
83	Pick Up	1	1	0
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	64	64	3
85	Rak Besi	22	22	0
86	Rak Kayu	6	6	0
87	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1	0
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16	16	1
89	Sepeda Motor	21	21	0
90	Server	2	2	0
91	Sice	1	1	0
92	Sketsel	2	2	0
93	Sofa	2	2	0
94	Sound System	5	5	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URAIAN	P-RKBMD 2025		
		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
95	Station Wagon	5	5	0
96	Stationary Generating Set	1	1	0
97	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1	1	0
98	Tabung Gas	1	1	0
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	0
100	Tangga Aluminium	1	1	0
101	Telephone (PABX)	1	1	0
102	Telephone Hybrid	2	2	0
103	Televisi	9	9	1
104	Tempat Tidur Kayu	1	1	0
105	Transportable Generating Set	1	1	0
106	Unit Power Supply	6	6	0
107	White Board	2	2	0
107	Video Confrence Unit	0	0	1
108	Alat Jaringan Komputer	0	0	0
109	Air Purifier	0	0	0
110	Mesin Antrian	0	0	1
111	Tombol panggil antrian	0	0	12
112	Display Loker	0	0	12
113	Insight Standing Kios K Touch	0	0	1
114	Videotron	0	0	1
115	Neon Box	0	0	1
116	Meja Kerja Pelayanan	0	0	15
117	Kursi Kerja Pelayanan	0	0	15
118	Kursi Hadap Pelayanan	0	0	30
119	Meja Printer	0	0	15
120	Sofa Tunggu Pelayanan	0	0	4
121	Perosotan Anak	0	0	1
122	Jungkat-Jungkit	0	0	1
123	Headset	0	0	15
124	Kursi Roda	0	0	1
125	Standing Fan	0	0	4
126	Fingerprint Scanner	0	0	2
127	Fingerprint Scanner	0	0	1
128	Iris Kamera	0	0	1
129	Alat Pemindai Tandatangan E-KTP	0	0	1
130	PRINTER KTP	0	0	1

Berdasarkan RKBMD tahun 2025 di atas, untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang sasaran kinerja di sajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.
Efisiensi Sarana dan Prasarana
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Capaian Kinerja 2025 (%)	RKBMD	Realisasi	% ketercapaian sarpras	Tingkat Efisiensi
TUJUAN: Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	1	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	2114,34%	154 Unit	154 Unit	100%	2114,34%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Capaian Kinerja 2025 (%)	RKBMD	Realisasi	% ketercapaian sarpras	Tingkat Efisiensi
Sasaran Strategis:							
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	a	Realisasi Investasi Daerah	100%	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (3 unit)	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (3 unit)	100%	100%
Program promosi penanaman modal		Prosentase jenis usaha baru yang masuk di oss	100%	sda	sda	sda	100%
Program pengembangan iklim penanaman modal		Prosentase penambahan investasi baru	100%	sda	sda	sda	100%
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal		Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	94,12%	sda	sda	sda	94,12%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	b	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,79%	146 Unit P.C Unit (6 unit), Printer (3 unit), Scanner (1 unit), Televisi (1 unit), Video Conference Unit (1 unit), Tombol panggil antrian (12 unit), Mesin Antrian (1 unit), Display Locket (12 unit), Insight Standing Kios K Touch (1 unit), Videotron (1 unit), Neon Box (1 unit), Meja Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Hadap Pelayanan (30 unit), Meja Printer (15 unit), Sofa Tunggu Pelayanan (4 unit) Perosotan Anak (1 unit), Jungkat-Jungkit (1 unit), Headset (15 unit), Kursi Roda (1 unit), Standing Fan (4 unit) Fingerprint Scanner (2 unit) Iris Kamera (1 unit), Alat Pemindai Tandatangan E-KTP (1 unit), Printer KTP (1 unit)	146 Unit P.C Unit (6 unit), Printer (3 unit), Scanner (1 unit), Televisi (1 unit), Video Conference Unit (1 unit), Tombol panggil antrian (12 unit), Mesin Antrian (1 unit), Display Locket (12 unit), Insight Standing Kios K Touch (1 unit), Videotron (1 unit), Neon Box (1 unit), Meja Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Kerja Pelayanan (15 unit), Kursi Hadap Pelayanan (30 unit), Meja Printer (15 unit), Sofa Tunggu Pelayanan (4 unit) Perosotan Anak (1 unit), Jungkat-Jungkit (1 unit), Headset (15 unit), Kursi Roda (1 unit), Standing Fan (4 unit) Fingerprint Scanner (2 unit) Iris Kamera (1 unit), Alat Pemindai Tandatangan E-KTP (1 unit), Printer KTP (1 unit)	100%	100,79%
Program pelayanan penanaman modal		Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai sop	106,40%	sda	sda	sda	106,40%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan/Sasaran	No	Indikator	Capaian Kinerja 2025 (%)	RKBMD	Realisasi	% ketercukupan sarpras	Tingkat Efisiensi
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal		Persentase pengguna data pelayanan perizinan	113,33%	sda	sda	sda	113,33%
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih Dan Efektif	c	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100,34%	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (2unit), Fingerprint Scanner (1unit)	4 Unit Lemari Besi/Metal (1 unit), P.C Unit (2unit), Fingerprint Scanner (1unit)	100%	100,34%
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Nilai evaluasi akip perangkat daerah	97,13%	sda	sda	sda	97,13%

Berdasarkan Tabel 3.2.1, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 menunjukkan keterkaitan yang kuat antara pemenuhan sarana prasarana dengan pencapaian kinerja organisasi. Secara umum, tingkat ketercukupan sarana dan prasarana mencapai 100%, yang berarti seluruh kebutuhan barang milik daerah sesuai RKBMD telah terpenuhi dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah.

1. Pencapaian Tujuan

Meningkatkan Penanaman Modal Daerah

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi menunjukkan capaian kinerja sebesar 2114,34%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Pemenuhan sarana prasarana sebanyak 154 unit terealisasi seluruhnya sesuai perencanaan (100%). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan fasilitas kerja yang memadai berkontribusi signifikan terhadap peningkatan realisasi investasi daerah serta efektivitas pelaksanaan layanan penanaman modal.

2. Sasaran Strategis

a. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Pada indikator Realisasi Investasi Daerah, capaian kinerja mencapai 100% dengan dukungan sarana berupa lemari besi dan perangkat komputer

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang seluruhnya terealisasi sesuai kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan kesesuaian antara perencanaan pengadaan sarana dengan kebutuhan operasional pelayanan investasi.

Program-program pendukung juga menunjukkan capaian optimal, antara lain:

- Persentase jenis usaha baru yang masuk OSS mencapai 100%;
- Persentase penambahan investasi baru mencapai 100%;
- Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal mencapai 94,12%.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas fungsi pengendalian dan pembinaan investasi yang didukung oleh ketersediaan sarana kerja yang memadai.

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 100,79%, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat berada di atas target. Pemenuhan sarana pelayanan sebanyak 146 unit telah terealisasi 100%, meliputi perangkat teknologi informasi, sistem antrian elektronik, fasilitas pelayanan publik, serta sarana pendukung kenyamanan masyarakat. Ketersediaan sarana pelayanan modern seperti mesin antrian, videotron, kios layanan mandiri, hingga fasilitas ramah masyarakat berkontribusi langsung terhadap:

- Persentase layanan perizinan tepat waktu sebesar 106,40%;
- Persentase pengguna data pelayanan perizinan sebesar 113,33%.

Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada sarana pelayanan publik mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus efisiensi proses perizinan.

c. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 100,34% dengan dukungan pemenuhan sarana sebanyak 4 unit yang terealisasi seluruhnya. Capaian ini memperlihatkan bahwa dukungan fasilitas administrasi dan teknologi informasi mampu memperkuat tata kelola organisasi, akuntabilitas kinerja, serta implementasi reformasi birokrasi. Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah mencapai 97,13%, menunjukkan tingkat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

akuntabilitas kinerja yang sangat baik dan selaras dengan pemanfaatan sarana prasarana yang efektif.

Secara keseluruhan, ketercukupan sarana dan prasarana yang mencapai 100% menunjukkan keselarasan antara perencanaan kebutuhan barang milik daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya capaian indikator kinerja, bahkan sebagian besar melampaui target yang telah ditetapkan. Pemenuhan sarana prasarana tidak hanya mendukung kelancaran operasional perangkat daerah, tetapi juga berperan strategis dalam:

- meningkatkan realisasi investasi daerah,
- memperbaiki kualitas pelayanan perizinan,
- serta memperkuat tata kelola birokrasi yang efektif dan akuntabel

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang melakukan perbaikan kinerja dengan mempertimbangkan capaian, faktor pendukung, serta bottleneck pada masing-masing tujuan dan sasaran strategis. Capaian Tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi investasi mengalami akselerasi yang sangat tinggi, kualitas pelayanan terus meningkat, sedangkan Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan secara bertahap namun masih memiliki ruang perbaikan terhadap target jangka menengah.

Oleh karena itu, upaya perbaikan Tahun 2026 diarahkan pada penguatan keberlanjutan investasi, peningkatan kualitas pelayanan berbasis kebutuhan pengguna, serta penguatan manajemen kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Berikut upaya-upaya perbaikan dan alternative untuk perbaiki pada tahun – tahun berikutnya antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Perangkat Daerah

Meningkatkan Penanaman Modal Daerah

Realisasi Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Tahun 2025 sebesar 63,43%, meningkat sangat signifikan dibandingkan Tahun 2024 sebesar -9,58%. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh realisasi investasi yang berasal dari

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan, khususnya perusahaan PMA. Namun, pola pertumbuhan Tahun 2023–2025 yang berubah dari 5,05% menjadi -9,58% dan kemudian 63,43% menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi masih memiliki tingkat volatilitas yang tinggi.

Atas kondisi tersebut, upaya perbaikan Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memperkuat investment pipeline dengan melakukan pemutakhiran data investasi berdasarkan tahapan potensi, minat, komitmen, perizinan, pelaksanaan proyek, sampai dengan realisasi.
2. Meningkatkan fasilitasi dan monitoring investasi, terutama terhadap proyek dan perusahaan yang memiliki potensi ekspansi atau peningkatan nilai investasi.
3. Memperkuat investor retention, dengan mengidentifikasi perusahaan eksisting yang mempunyai peluang melakukan reinvestasi dan pengembangan kapasitas.
4. Meningkatkan promosi investasi yang lebih terarah, dengan menghubungkan potensi investasi daerah dengan kebutuhan dan karakteristik calon investor, sehingga promosi tidak hanya berorientasi pada jumlah kegiatan tetapi pada potensi konversi menjadi investasi.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan realisasi investasi dan menetapkan langkah percepatan apabila terdapat deviasi dari proyeksi.
6. Memperkuat koordinasi penyelesaian hambatan investasi lintas perangkat daerah agar permasalahan yang berada di luar kewenangan langsung DPMPTSP dapat segera difasilitasi penyelesaiannya.

b. Sasaran Strategis Perangkat Daerah**➤ Meningkatkan Realisasi Investasi Daerah**

Realisasi investasi Tahun 2025 sebesar Rp2,5356 triliun berada dalam rentang target jangka menengah Rp1,885–Rp2,850 triliun dan mencapai sekitar 88,97% dari batas atas target. Kenaikan sekitar Rp984,11 miliar dibandingkan Tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat akselerasi nilai investasi yang sangat signifikan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian tersebut antara lain didukung oleh ekspansi dan pengembangan kapasitas perusahaan. Namun, ketergantungan terhadap investasi berskala besar serta belum optimalnya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pemantauan investasi pada setiap tahapan menjadi bottleneck yang perlu diantisipasi.

Oleh karena itu, upaya perbaikan Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Mengoptimalkan data LKPM/OSS untuk mengidentifikasi perusahaan yang menunjukkan potensi peningkatan realisasi investasi, termasuk perusahaan yang sedang melakukan ekspansi atau memiliki komitmen investasi.
2. Melakukan segmentasi investor dan perusahaan, antara lain berdasarkan nilai investasi, sektor usaha, tahapan proyek dan potensi ekspansi, untuk menentukan prioritas fasilitasi.
3. Membangun monitoring proyek investasi prioritas, meliputi nilai investasi, tahapan realisasi, kendala, PIC, perangkat daerah terkait dan target penyelesaian.
4. Memperkuat fasilitasi dan penyelesaian permasalahan investasi, terutama permasalahan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan realisasi.
5. Mengembangkan investment matching, yaitu menghubungkan potensi investasi daerah dengan kebutuhan calon investor secara lebih spesifik.

Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian realisasi investasi, terutama terhadap proyek yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap target tahun berjalan.

➤ **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan**

Realisasi IKM Tahun 2025 sebesar 91,72 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 91,50 dan meningkat 0,64 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 91,08. Tren 2023–2025 menunjukkan peningkatan dari 89,94 menjadi 91,08 dan selanjutnya 91,72, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan secara konsisten. Namun, laju peningkatan 2025 lebih moderat dibandingkan kenaikan Tahun 2024.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah menjadi salah satu kekuatan organisasi, namun ruang perbaikannya semakin bersifat spesifik. Bottleneck utama bukan lagi pada pencapaian standar pelayanan secara umum, tetapi pada kemampuan mengidentifikasi unsur pelayanan yang masih menjadi sumber ketidakpuasan pengguna dan menerjemahkannya menjadi tindakan korektif.

Upaya perbaikan Tahun 2026 diarahkan pada:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil IKM dan data operasional pelayanan.
2. Melakukan analisis terhadap unsur pembentuk IKM, sehingga diketahui secara spesifik unsur pelayanan yang telah kuat dan unsur yang masih memerlukan perbaikan.
3. Melaksanakan evaluasi akhir terhadap hasil nilai IKM melalui Sukma Santri sebagai bahan penetapan prioritas perbaikan pelayanan pada periode berikutnya.
4. Menyusun corrective action terhadap unsur pelayanan dengan nilai relatif rendah, lengkap dengan PIC, target waktu penyelesaian dan bukti tindak lanjut.
5. Mendorong penyelesaian pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat, serta menggunakan pola pengaduan sebagai bahan identifikasi masalah pelayanan.
6. Memperkuat kompetensi dan kesiapan SDM pelayanan, terutama menghadapi peningkatan volume dan kompleksitas layanan.
7. Mengoptimalkan layanan berbasis elektronik untuk meningkatkan kemudahan, kepastian, transparansi dan keterlacakan proses pelayanan.

➤ Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif

Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar 80,52, meningkat 0,27 poin dibandingkan Tahun 2024 sebesar 80,25 dan meningkat dari 80,05 pada Tahun 2023. Meskipun target tahunan telah tercapai, nilai tersebut masih memiliki gap 0,48 poin terhadap target akhir RPJMD sebesar 81.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah berjalan konsisten, namun peningkatan nilai masih bersifat gradual. Oleh karena itu, bottleneck yang perlu ditangani bukan semata-mata kekurangan aktivitas RB, melainkan kualitas implementasi dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja.

Upaya perbaikan Tahun 2026 diarahkan pada:

1. Memastikan pemenuhan data dukung/eviden Reformasi Birokrasi secara lengkap, valid dan berkualitas, sehingga setiap capaian dapat ditelusuri dan diverifikasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB secara berkala, tidak hanya untuk memantau kelengkapan dokumen tetapi juga untuk mengidentifikasi deviasi dan akar permasalahannya.
 3. Memperkuat cascading kinerja, sehingga sasaran organisasi dapat diterjemahkan secara jelas ke dalam sasaran unit dan kinerja individu.
 4. Memperkuat orientasi outcome, dengan memastikan bahwa laporan kinerja menjelaskan perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah kegiatan atau dokumen yang disusun.
 5. Mengintegrasikan manajemen risiko dengan sasaran dan indikator kinerja, sehingga risiko pencapaian target dapat diidentifikasi dan dikendalikan lebih dini.
 6. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan, termasuk dalam menetapkan corrective action.
 7. Mendorong pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebesar 81 melalui intervensi pada area yang masih memberikan gap terhadap target.
 8. Memonitor penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi, sehingga evaluasi menghasilkan perubahan nyata dalam pengelolaan kinerja
-

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah selama Tahun 2025. Penyusunan laporan ini sekaligus menjadi instrumen untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menyediakan dasar bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja, secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik, dengan karakteristik capaian yang berbeda pada masing-masing tujuan dan sasaran strategis.

a. Tujuan Meningkatkan Penanaman Modal Daerah,

Indikator Persentase Peningkatan Realisasi Investasi mencapai 63,43%, jauh di atas target tahunan sebesar 3,00% dan berada jauh di atas target akhir RPJMD sebesar 3,55%. Capaian tersebut menunjukkan adanya akselerasi realisasi investasi yang sangat kuat pada Tahun 2025, terutama yang didukung oleh peningkatan dan pengembangan kapasitas produksi sejumlah perusahaan, khususnya perusahaan PMA. Namun demikian, analisis historis 2023–2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi masih bersifat fluktuatif, yaitu sebesar 5,05% pada Tahun 2023, -9,58% pada Tahun 2024, dan 63,43% pada Tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi memastikan agar pertumbuhan tersebut lebih stabil, terdiversifikasi dan berkelanjutan.

b. Pada sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah, realisasi investasi Tahun 2025 mencapai Rp2.535.606.720.390,00 atau sekitar Rp2,536 triliun. Realisasi tersebut

berada dalam rentang target jangka menengah Rp1,885 triliun sampai dengan Rp2,850 triliun dan telah mencapai sekitar 88,97% dari batas atas target. Dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp1,551 triliun, terjadi peningkatan sekitar Rp984,11 miliar atau 63,43%. Capaian tersebut menunjukkan kapasitas daerah dalam menghasilkan realisasi investasi yang tinggi. Meskipun demikian, struktur pertumbuhan yang antara lain dipengaruhi oleh ekspansi sejumlah perusahaan berskala besar perlu diikuti dengan strategi diversifikasi sumber dan sektor investasi agar kinerja tidak terlalu bergantung pada beberapa proyek tertentu. Penguatan investment pipeline, investor retention, investment matching, serta pengawalan proyek investasi sampai dengan realisasi menjadi kebutuhan strategis pada periode berikutnya.

- c. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, IKM Tahun 2025 mencapai 91,72, melampaui target tahunan sebesar 91,00 serta target akhir RPJMD sebesar 91,50. Nilai tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 91,08 dan Tahun 2023 sebesar 89,94. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan telah mengalami perbaikan secara konsisten dan menjadi salah satu kekuatan kinerja DPMPTSP. Namun, peningkatan nilai IKM yang semakin moderat menunjukkan bahwa ruang perbaikan berikutnya perlu diarahkan secara lebih spesifik berdasarkan unsur pelayanan, pengaduan dan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, hasil survei kepuasan masyarakat perlu semakin dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk menetapkan tindakan korektif dan peningkatan kualitas pelayanan.
- d. Pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Efektif, Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 mencapai 80,52, meningkat dari 80,25 pada Tahun 2024 dan 80,05 pada Tahun 2023. Capaian tersebut telah melampaui target tahunan sebesar 80,25, tetapi masih memiliki gap sebesar 0,48 poin terhadap target akhir RPJMD sebesar 81. Tren peningkatan menunjukkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi berjalan secara konsisten, namun peningkatannya masih bersifat gradual. Oleh karena itu, penguatan pada periode berikutnya perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan dokumen dan eviden, tetapi pada peningkatan kualitas cascading kinerja, orientasi outcome, pengelolaan risiko, pengendalian internal, kualitas data kinerja, serta pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi Tahun 2025 menunjukkan adanya tiga pembelajaran utama. Pertama, kinerja investasi mengalami akselerasi sangat tinggi tetapi masih menghadapi risiko volatilitas, sehingga diperlukan penguatan keberlanjutan dan prediktabilitas investasi. Kedua, kualitas pelayanan telah menunjukkan peningkatan yang konsisten dan telah mencapai target jangka menengah, sehingga strategi berikutnya perlu diarahkan pada peningkatan yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan pengguna. Ketiga, tata kelola birokrasi menunjukkan perbaikan berkelanjutan namun masih memerlukan peningkatan kualitas dan kematangan sistem manajemen kinerja untuk menutup gap terhadap target jangka menengah.

Dengan demikian, LKjIP Tahun 2025 tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target, tetapi juga memberikan pembelajaran bahwa keberhasilan kinerja harus dipertahankan melalui pengelolaan faktor pendukung, sementara bottleneck harus direspons melalui tindakan korektif yang terukur. Hasil evaluasi Tahun 2025 selanjutnya menjadi dasar dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan kinerja Tahun 2026.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan arah perbaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang pada Tahun 2026 dan periode selanjutnya.

a. Penguatan keberlanjutan investasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang perlu mengembangkan pengelolaan investasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai realisasi tahunan, tetapi juga pada sustainability dan predictability. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan investment pipeline, pemutakhiran data investasi berbasis tahapan proyek, peningkatan investor retention, serta pengawasan investasi prioritas sampai dengan realisasi.

b. Optimalisasi data LKPM/OSS sebagai instrumen pengendalian kinerja investasi

Data LKPM/OSS perlu dimanfaatkan secara lebih sistematis untuk mengidentifikasi perusahaan yang memiliki potensi peningkatan investasi, mendeteksi proyek yang berisiko mengalami keterlambatan, serta menjadi dasar penentuan prioritas fasilitasi dan penyelesaian permasalahan investasi.

c. Penguatan koordinasi penyelesaian hambatan investasi

Mengingat sebagian hambatan investasi berada di luar kewenangan langsung DPMPTSP, perlu diperkuat koordinasi lintas perangkat daerah melalui mekanisme yang jelas, termasuk penetapan PIC, batas waktu penyelesaian, pemantauan status dan dokumentasi hasil penyelesaian permasalahan.

d. Mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan

Kinerja pelayanan yang telah mencapai tingkat tinggi perlu dipertahankan melalui penguatan kualitas SDM, optimalisasi pelayanan berbasis elektronik, peningkatan kepastian dan ketepatan waktu pelayanan, serta penguatan mekanisme penanganan pengaduan. Peningkatan kualitas ke depan sebaiknya dilakukan berdasarkan unsur pelayanan yang masih memiliki ruang perbaikan, bukan hanya mengejar peningkatan angka IKM secara agregat.

e. Mengoptimalkan hasil IKM sebagai dasar corrective action

Hasil survei IKM melalui Sukma Santri perlu dimanfaatkan secara lebih operasional dengan mengidentifikasi unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, menetapkan tindakan perbaikan, menentukan PIC dan target penyelesaian, serta memonitor tingkat penyelesaiannya. Dengan demikian, survei kepuasan tidak berhenti sebagai alat pengukuran, tetapi menjadi instrumen perbaikan pelayanan.

f. Memperkuat sistem manajemen kinerja dan implementasi SAKIP

Pengelolaan kinerja perlu diarahkan pada keterhubungan yang semakin kuat antara perencanaan, target kinerja, pelaksanaan, pengukuran, monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan. Cascading sasaran perlu diperkuat sampai tingkat individu agar kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian sasaran organisasi dapat terlihat dan diukur.

g. Meningkatkan orientasi outcome dan pemanfaatan hasil evaluasi

Pengukuran dan pelaporan kinerja perlu semakin berorientasi pada perubahan atau outcome yang dihasilkan. Hasil monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi bahan pelaporan, tetapi harus digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, redistribusi sumber daya, penyesuaian strategi dan corrective action.

h. Mengintegrasikan manajemen risiko dengan pengelolaan kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran strategis perlu diidentifikasi dan dihubungkan secara langsung dengan indikator kinerja. Setiap risiko prioritas perlu memiliki rencana tindak pengendalian, PIC, target waktu dan mekanisme monitoring sehingga pengendalian dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan pencapaian target.

i. **Memperkuat kualitas data dan evidence kinerja**

Setiap indikator kinerja perlu memiliki sumber data yang jelas, mekanisme validasi, penanggung jawab, periode pengukuran dan bukti dukung yang memadai. Penguatan kualitas data menjadi penting agar setiap capaian kinerja dapat ditelusuri, diverifikasi dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dengan arah tersebut, diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang pada Tahun 2026 dan periode berikutnya semakin efektif, terukur, berorientasi outcome, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap peningkatan investasi, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Jombang, Februari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN JOMBANG



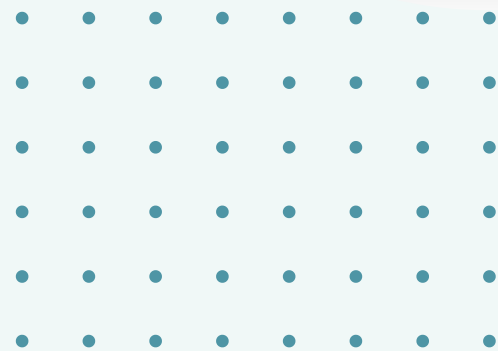
BAYU PANCORCADI, S.T.,M.T.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19741209 200312 1 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG



Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid
No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmptsp.jombangkab.go.id



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 100.3.7.1/ 172/415.35/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. WOR WINDARI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. Teguh Narutomo. MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

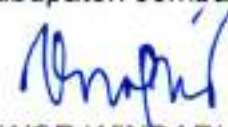
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang



Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM

Jombang, 20 Januari 2025
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP 197312041992022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

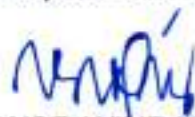
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2.000.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,2
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	73
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	81

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	172.645.900
2.	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	647.355.200
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	176.660.000
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop	85%	263.313.200
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23%	155.000.000
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	9.006.543.391
TOTAL ANGGARAN					10.421.517.691

 **PIHAK KEDUA**
Pj Bupati Jombang

Dr. Drs. Teguh Narutomo, MM

Jombang, 20 Januari 2025
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang


Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP. 197312041992022001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR: 100.3.7.1/487/415.01/2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. WOR WINDARI, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 19 September 2024
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatar  lektronik

Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatar  lektronik

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN JOMBANG

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1.900.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,1
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	71
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	80,5

NO .	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase Dokumen Potensi Dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100%	277.389.334
2	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindak Lanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100%	1.219.850.400
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	80%	544.442.940
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai Sop	82 %	320.408.300
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan	23 %	363.690.000

	Penanaman Modal	Modal	Perizinan		
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	11.143.464.237
TOTAL ANGGARAN					13.869.245.211

Jombang, 19 September 2024

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA

Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	JOKO TRIYONO	1	NAMA	WARSUBI
2	NIP	197111161999031002	2	NIP	-
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	/
4	JABATAN	Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	JABATAN	Bupati
5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Realisasi Investasi Daerah	1.598.000.000.000,- sd 2.820.000.000.000	penguatan_internal	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	penguatan_internal	
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80,25	penguatan_internal	
4	Meningkatkan Penanaman Modal Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	3%	penguatan_internal	
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				
3	Kompeten				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				
4	Harmonis				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif				
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	JOKO TRIYONO	1	NAMA	WARSUBI
2	NIP	197111161999031002	2	NIP	-
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	/
4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	JABATAN	Bupati
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Pemerintah Kabupaten Jombang
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
UTAMA					
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	kuantitas	Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	5%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya penambahan investasi baru	kuantitas	Prosentase penambahan investasi baru	10%
3	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	kuantitas	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	80%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	kuantitas	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85%
5	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Efektif Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	kuantitas	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81
6	Meningkatnya Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS Indikator : Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	Meningkatnya peluang investasi daerah	kuantitas	Jumlah Jenis Usaha Baru yang masuk di oss	100 KBLI
7	Meningkatnya penambahan investasi baru Indikator : Prosentase penambahan investasi baru	Tersedianya informasi potensi dan peluang investasi daerah	kuantitas	Jumlah pengguna informasi peta potensi	50 pengguna
8	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal Indikator : Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	kuantitas	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	85 Perusahaan
9	Meningkatnya Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Indikator : Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	Terselenggaranya pelayanan perijinan	kuantitas	Prosentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90%

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
UTAMA					
10	Meningkatnya Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Indikator : Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	Meningkatnya pengaduan masyarakat yang diselesaikan	kuantitas	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%
11	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	kuantitas	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen
12	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	kuantitas	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	31 laporan
13	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	kuantitas	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 laporan
14	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	kuantitas	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Perizinan	8 dokumen
			kuantitas	Jumlah Pengguna data pelayanan perizinan	40.000 pengguna
15	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya Pengadaan barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kuantitas	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 laporan
16	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kuantitas	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan
17	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kuantitas	Jumlah laporan pemeliharaa n barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan
18	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Efektif Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya pengguna data pelayanan perizinan	kuantitas	Persentase pengguna data pelayanan perizinan	90 %
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MU'JIZATUN KHOIRIYAH	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	196604091989022003	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Madya	4	JABATAN	Plt. Kepala Dinas
5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Terselenggaranya pelayanan perijinan	kuantitas	Presentase Pegaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	kuantitas	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	150 Kegiatan Usaha
3	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	kuantitas	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	85%
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	AGUS NURBADE ESTI WIDODO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197308032001121006	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Madya	4	JABATAN	Plt. Kepala Dinas
5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pengguna Data Pelayanan Perizinan	kuantitas	Persentase Pengguna Data Pelayanan Perizinan	90 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	kuantitas	Jumlah Pengguna data pelayanan perizinan	40000 Pengguna
			kuantitas	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Perizinan	8 Dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SUWITO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	196809281990031005	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Madya	4	JABATAN	Plt. Kepala Dinas
5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5	UNIT KERJA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Jenis Usaha baru yang masuk di OSS	kuantitas	Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	5%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Indikator : Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya penambahan investasi baru	kuantitas	Prosentase penambahan investasi baru	10%
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: ramah dan solutif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjadi role model/panutan dalam menunjang komitmen dan integritas pegawai di lingkungan kerjanya		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan atau ketrampilan yang dimiliki/ kepada orang lain . -Menyelesaikan setiap pekerjaan sesuai denga target dan standart kualitas yang ditetapkan		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Membangun komunikasi yang lebih terbuka dan menjaga hubungan baik dengan stakeholder		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berani menyampaikan adanya indikasi/ hal-hal yang dapat merugikan dan membahayakan Negara		

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, mengikuti perubahan peraturan perundangan yang berlaku dan bertindak proaktif atas perubahan peraturan perundang yang terkait dengan tupoksi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah, berpikiran terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah serta dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DIDIK SUGIYONO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198506302011011005	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Perencana Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan aturan	kuantitas	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan aturan	kuantitas	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Laporan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi		
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	LULUK MAIMUNAH	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197210051998032005	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Keuangan dan Aset	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Konsistensi Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan dan Aset SKPD Sesuai dengan aturan	kuantitas	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang
			kuantitas	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangann Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		
4	Harmonis				

PERILAKU KERJA		
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	TEGUH INDARTO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197709072005011008	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
No	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kuantitas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket
2	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kuantitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket
3	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	kuantitas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket
4	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	kuantitas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket
5	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	kuantitas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
6	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	kuantitas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen
7	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kuantitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
8	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
9	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
10	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	kuantitas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan
11	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kuantitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1 2	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kuantitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit
1 3	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
1 4	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit
1 5	Terwujudnya Pengadaan barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kuantitas	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	CAHYO IVAN PRIYAGUNG	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197711182005011008	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	kuantitas	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 kegiatan usaha
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 pelaku usaha
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	PUTRI ARINA HAYU	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198704302011012008	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	kuantitas	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Perizinan Yang Disusun	4 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	UMI MU'ALIFAH	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197306141996022001	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	kuantitas	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	HENDRAWAN WIBISONO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197805072011011001	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secara Elektronik	8000
2	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	kuantitas	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis,evaluasi, an pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2500
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	DEDIK EKO PURWANTO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198512292011011007	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya peluang investasi daerah	Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal	kuantitas	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Kegiatan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SISKA UTAMI	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197611101998032005	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Tingkat I / III/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Kerja dan Transmigrasi	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya informasi potensi dan peluang investasi daerah	Tersusunnya peta potensi investasi kabupaten/kota	kuantitas	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	YENI AGUSTININGSIH	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198208082015052001	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran OPD	kuantitas	Jumlah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang di susun	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKI (Indikator Kinerja Individu) SKPD	2 dokumen
			kuantitas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA -P) / RKT SKPD yang disusun	2 dokumen
			kuantitas	Jumlah Dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) dan RKAP SKPD yang disusun	2 dokumen
			kuantitas	Jumlah entri Dokumen RKA, RKA-P dan Anggaran Kas ke SIPD	2 dokumen
			kuantitas	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (Eselon II, III, IV dan pelaksana)	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan (Eselon II, III, IV dan pelaksana)	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Dokumen Rencana Aksi yang disusun	1 dokumen

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
2	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja OPD	kuantitas	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD yang disusun	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Laporan Data Capaian Kinerja SKPD sebagai bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD yang disusun	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Triwulan I, II, III dan IV SKPD yang disusun	4 dokumen
			kuantitas	Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja (Kurja) Tribulan dan Tahunan yang disusun	5 dokumen
			kuantitas	Laporan Monitoring dan evaluasi Program Kegiatan yang disusun	4 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi		
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi		
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	GIA YUDHI DHARMA	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197709302003121003	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
No	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Terselenggaranya pengelolaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	kuantitas	Jumlah daftar potongan gaji pegawai berdasarkan data dari bank,koperasi, korpri setiap bulan	12 laporan
			kuantitas	Jumlah pelaksanaan transfer dana via internet banking ke rekening masing- masing pegawai dan pelaksana kegiatan	600 transfer
			kuantitas	Jumlah verifikasi setiap pengajuan SPJ GU, TU, LS dari PPTK	325 verifikasi
			kuantitas	Jumlah penandatanganan pengajuan SPJ dan SPP baik GU, TU dan LS dari PPTK	325 berkas
			kuantitas	Jumlah pemungutan dan pemotongan pengenaan PPN, PPh 21, PPh 22 dan PPh 23 berdasarkan pengajuan SPJ dari PPTK	120 bendel
			kuantitas	Jumlah bukti potong SPT Tahunan Gaji PNS	32 bukti potong

HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
2	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Tersusunnya dokumen pelaporan keuangan sesuai dengan aturan	kuantitas	Jumlah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pembuatan laporan keuangan bulanan	12 berkas
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Tribulan (Laporan Realisasi Penyerapan Tribulan, Laporan Rekonsiliasi antara LO dan LRA)	8 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Semester (LRA Per Periode, Laporan Prognosis)	1 laporan
			kuantitas	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan (CALK, LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca)	5 laporan
			kuantitas	Jumlah penandatanganan laporan keuangan bulanan	12 berkas
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik		
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi		
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi		
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	HADI SUPRASTYONO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198310052005011005	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Pengelolaan penerimaan retribusi daerah	kuantitas	Jumlah penerimaan pembayaran retribusi daerah secara non tunai	720 dokumen
			kuantitas	Jumlah cetakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	720 dokumen
			kuantitas	Jumlah entri penerimaan di SIPD	96 dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Menyusun laporan penerimaan retribusi daerah	kuantitas	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per bulan.	12 bendel
			kuantitas	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah pertahun.	1 buku
			kuantitas	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pertahun	1 buku
			kuantitas	Jumlah rekapitulasi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pertahun	1 buku
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan yang maksimal		
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan		
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik		Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersedia untuk mengajarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada orang lain		
4	Harmonis				

PERILAKU KERJA		
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu berkoordinasi dengan baik dengan membangun komunikasi yang baik
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjaga rahasia jabatan dan nama baik instansi
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Selalu beradaptasi dengan hal yang baru untuk meningkatkan kompetensi
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Dapat bekerjasama dengan tim dengan baik agar target kinerja tercapai

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	INDAH AMBARWATI	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198912082020122003	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Terselenggaranya pengelolaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	kuantitas	Jumlah entri pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ke Aplikasi SIPD	325 entri
			kuantitas	Jumlah bill pembayaran pajak	200 bill
			kuantitas	Jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui Aplikasi SIPD	200 spp
			kuantitas	Jumlah Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Aplikasi SIPD	200 spm
			kuantitas	Jumlah pengelolaan arsip SPJ, SPP, SPM dan SP2D gaji pegawai	325 arsip
			kuantitas	Jumlah penataan berkas pengajuan SPJ GU, TU dan LS yang akan dikirim ke BPKAD	325 berkas
			kuantitas	Jumlah penghitungan tarif pengenaan pajak berdasarkan pengajuan SPJ dari PPTK	120 bendel
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis				

PERILAKU KERJA		
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ANDHIKA EKA SANTOSO	1	NAMA	TEGUH INDARTO
2	NIP	199206292024212011	2	NIP	197709072005011008
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur / II/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b
4	JABATAN	Pranata Komputer Terampil	4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercatatnya keluar masuk barang habis pakai	kuantitas	Jumlah laporan data persediaan barang	12 Laporan
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengelola surat keluar masuk	kuantitas	Jumlah Surat Masuk yang di kelola	300 Surat
			kuantitas	Jumlah Surat keluar yang di kelola	300 surat
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan tugas Operator Aplikasi Srikandi	kuantitas	Jumlah surat yang diproses pada Aplikasi Srikandi	3000 Surat
4	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyiapan bahan rapat dan tercatatnya kegiatan rapat dalam bentuk Notulen Rapat	kuantitas	Jumlah laporan kegiatan rapat yang terlaksana	30 Laporan
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tercatatnya Barang Inventaris Kantor ke Dalam Aplikasi e-BMD	kuantitas	Laporan Inventarisasi e-BMD	12 Dokumen
			kuantitas	Terupdatenya data penanggung jawab barang	1 Kegiatan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MUHAMMAD DONNY ARTOYUDHO	1	NAMA	TEGUH INDARTO
2	NIP	197903192011011002	2	NIP	197709072005011008
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	kuantitas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket
2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kuantitas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
3	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan	kuantitas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit
4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	kuantitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125 Unit
5	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya kegiatan penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian administrasi kepegawaian	kuantitas	Jumlah laporan absensi dan kepegawaian	12 Laporan
			kuantitas	Jumlah data TPP	12 Dokumen
			kuantitas	Jumlah data usulan kenaikan pangkat	2 Usulan
			kuantitas	Jumlah laporan data pegawai yang mengajukan cuti	12 Laporan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				

PERILAKU KERJA		
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis	
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal	
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 21 APRIL SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ENDIK SAHRIYA	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198212062025211004	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur Muda / II/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kuantitas	Jumlah laporan data persediaan barang	12 Dokumen
2	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	kuantitas	Jumlah dokumen/berkas permohonan perizinan non berusaha yang diberikan nomor registrasi	2000 Dokumen
			kuantitas	Jumlah surat masuk yang didisposisikan kepada bidang terkait	300 Surat
3	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kuantitas	Jumlah laporan kegiatan rapat yang telah disusun dan terdokumentasi	12 Laporan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SULAMI	1	NAMA	TEGUH INDARTO
2	NIP	198304212024212008	2	NIP	197709072005011008
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c
4	JABATAN	Arsiparis Ahli Pertama	4	JABATAN	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	5	UNIT KERJA	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercatatnya kearsipan dokumen	kuantitas	Jumlah dokumen yang tercatat	1600 dokumen
			kuantitas	Jumlah arsip yang di pilah sesuai pengelompokannya	2000 dokumen
2	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah administrasi kearsipan yang dientri kedalam aplikasi kearsipan	kuantitas	Arsip yang dientri dalam aplikasi	2400 dokumen
			kuantitas	Jumlah laporan dokumen kearsipan	8 dokumen
3	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya box penyimpanan dokumen	kuantitas	Jumlah box yang digunakan untuk kearsipan	1200 box
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

PERILAKU KERJA		
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	AMIEN JUNAEDI	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198306052010011002	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	kuantitas	Jumlah Berita Acara Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	24 dokumen
			kuantitas	Jumlah penyusunan laporan pengaduan masyarakat	24 dokumen
			kuantitas	Jumlah Monitoring terkait Pengaduan Masyarakat	24 kegiatan
			kuantitas	Jumlah analisa data permasalahan penanganan pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan	24 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	I'IS	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	199610032020122007	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	kuantitas	Jumlah administrasi pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan	24 dokumen
			kuantitas	Jumlah penyiapan dan pengumpulan data pengaduan dan informasi konsultasi pelayanan perizinan	24 dokumen
			kuantitas	Jumlah pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi pelayanan perizinan	24 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	MUTABI`IN	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197404072007011016	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	Pengadministrasi Perkantoran	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	kuantitas	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ;serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 Kegiatan Usaha
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SANTOSA	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197006022008011009	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	kuantitas	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	150 kegiatan usaha
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Terlaksananya Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	200 pelaku usaha
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ARIEF SOESANTO	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198110272008011007	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	kuantitas	Jumlah pelaksanaan pengelolaan dan monitoring aplikasi sistem informasi penanaman modal dan perizinan secara online.	12 kegiatan
			kuantitas	Jumlah penyusunan dokumen data perizinan non berusaha yang dikeluarkan	12 kegiatan
			kuantitas	Jumlah pelaksanaan monitoring dan update konten sistem informasi penanaman modal dan perizinan secara online secara berkelanjutan	12 kegiatan
			kuantitas	Jumlah monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengguna data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	12 kegiatan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				

PERILAKU KERJA		
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
6	Adaptif	
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	BAMBANG GATUT	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	196802222009011002	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pengatur Tingkat I / II/d	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGELOLA DATA REKONSILIASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	kuantitas	Jumlah tersusunnya dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah tersusunnya dokumen standar operasional prosedur (SOP)	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah tersusunnya dokumen audit mutu pelyanan (ISO)	1 dokumen
			kuantitas	Jumlah tersusunnya dokumen standar pelayanan (SP)	1 dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	ERMA DYAH ANGGRAENI	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197604232009012002	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Terselenggaranya Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12000
			kuantitas	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2000
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				

PERILAKU KERJA		
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
7	Kolaboratif	
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 OKTOBER SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	KHOIRUL MAWAHIB	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	197108102009011004	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda / III/a	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Terselenggaranya Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	kuantitas	Jumlah pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 izin
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	SUHARDI	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	196905042009061003	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Terselenggaranya Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	kuantitas	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti				
2	Akuntabel				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				
3	Kompeten				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				
4	Harmonis				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif				
5	Loyal				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara				
6	Adaptif				Ekspektasi Khusus Pimpinan: -
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif				
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	LINDA MUZAYANAH	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198703142015052001	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata Muda Tingkat I / III/b	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya peluang investasi daerah	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	kuantitas	Jumlah identifikasi sektor dan wilayah prioritas promosi	4 Laporan
			kuantitas	Jumlah materi sarana promosi yang tersedia	3 Dokumen
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat • Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan • Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	• Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi • Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien • Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah • Membantu orang lain belajar • Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya • Suka menolong orang lain • Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	• Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah • Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara • Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan • Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas • Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PEMERINTAH KAB. JOMBANG			PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER 2025		
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	NOVIANA IMA YULAIKHA	1	NAMA	JOKO TRIYONO
2	NIP	198111172015082001	2	NIP	197111161999031002
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Penata / III/c	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Tingkat I / IV/b
4	JABATAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	JABATAN	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	UNIT KERJA	Sekretariat	5	UNIT KERJA	Sekretariat
HASIL KERJA					
N o	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
UTAMA					
1	Meningkatnya peluang investasi daerah	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	kuantitas	Jumlah Terlaksananya Publikasi Informasi Promosi Penanaman Moda	3 Kegiatan
			kuantitas	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	3 Kegiatan
PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan				
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
2	Akuntabel				
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
3	Kompeten				
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
4	Harmonis				
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
5	Loyal				
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
6	Adaptif				
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan: -	
7	Kolaboratif				

PERILAKU KERJA		
	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: -

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

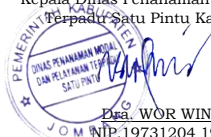
- 1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
- 2 NIP : 19731204 199202 2 001
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
- 4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- 5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan realisasi investasi daerah	3 kegiatan (500 Milyar)	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan realisasi investasi daerah	3 kegiatan (500 Milyar)	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan realisasi investasi daerah	3 kegiatan (500 Milyar)	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan realisasi investasi daerah	3 kegiatan (500 Milyar)
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan
							5 Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pendampingan proses perizinan strategis dan fasilitasi permasalahan	1 Kegiatan	5 Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pendampingan proses perizinan strategis dan fasilitasi permasalahan	1 Kegiatan
							6 Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pemetaan dan promosi potensi investasi	1 Kegiatan	6 Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pelaksanaan forum investasi dan business matching	1 kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 Melakukan pembinaan dan evaluasi laporan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan dan evaluasi laporan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan dan evaluasi laporan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan dan evaluasi laporan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan
									2 Melakukan supervisi dengan bidang terkait Optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital	nilai IKM 86
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan
									4 Melakukan supervisi dengan bidang terkait implementasi standar layanan dan SOP	Nilai IPP 4,2
		Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	5 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan
			4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	6 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan
									7 Melakukan supervisi dengan bidang terkait transparansi, akses informasi, dan keberpihakan pada layanan publik.	Indeks Kepatuhan PP 73
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD dan evaluasi pemenuhan dokumen SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD dan evaluasi pemenuhan dokumen SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan
			2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan
			3 Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan
			4 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan			4 Melakukan supervisi dengan bidang terkait evaluasi dan perbaikan nilai AKIP	nilai AKIP (81/A)		

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1			TRIBUNAL 2			TRIBUNAL 3			TRIBUNAL 4		
			RENCANA AKSI		TARGET	RENCANA AKSI		TARGET	RENCANA AKSI		TARGET	RENCANA AKSI		TARGET
			5	Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan									
4	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	1	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	3 kegiatan	1	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	1	Melakukan review atas rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	1 kegiatan	1	melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan
			2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tindak lanjut rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tindak lanjut rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan
												3	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	1 kegiatan (100%)
		Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan
			3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan
												4	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1 kegiatan (100%)
		Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan
			2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan
			4	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1 kegiatan (85%)	4	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1 kegiatan (85%)	4	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1 kegiatan (85%)	4	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1 kegiatan (85%)
		Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
													Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1 kegiatan (23%)
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
			3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan
			4 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 kegiatan (80%)	4 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 kegiatan (80%)	4 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 kegiatan (80%)	4 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 kegiatan (80%)
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan
			3 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 kegiatan (100%)	3 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 kegiatan (100%)	3 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 kegiatan (100%)	3 Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 kegiatan (100%)
5	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai RB	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 kegiatan
		Nilai ZI	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 kegiatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang


 Dra. WIR WINDARI, M.Si
 NIP.19731204 199202 2 001

MONEV RENAKSI									
TRIBUNAN 1									
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Menetapkan Rencana Kerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
5	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait Data penambahan investasi baru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait data jenis usaha baru /KBLI baru yang masuk di OSS	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pembinaan terkait data penambahan investasi baru	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melanjutkan kegiatan di TB II	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan					
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan					
Rata-rata kurja					100.00%				

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAL 2

Nama : WOR WINDARI

NIP : 197312041992022001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Sampai dengan TB II realisasi investasi tercapai Rp 523.537.117.693,- (data diambil tanggal 1/7/25)	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
4	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Memonitor proses penyusunan Perbup Tata Cara Pemberian Insentif	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindakanlanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	ISO akan dilaksanakan pada TB III	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindakanlanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Terdapat 42 pelaku usaha yang lapor LKPM dan 1 BAP pengawasan	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	Terdapat 42 pelaku usaha yang telah lapor LKPM pada TB II 2025	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
5	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	Melaksanakan persiapan TB III	
Rata-rata capaian					100.00%				

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNLAN 3

Nama : WOR WINDARI

NIP : 197312041992022001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian RB	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian RB	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian ZI	
	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	- Nilai RB - Nilai ZI	Melakukan koordinasi terkait implementasi ZI di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian ZI	
2	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan realisasi investasi daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	LKPM TB I sd TB III 2025	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pendampingan proses perizinan strategis dan fasilitasi permasalahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Realisasi Investasi	- Nilai Realisasi Investasi	Melakukan supervisi dengan bidang terkait Pemetaan dan promosi potensi investasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan pembinaan dan evaluasi laporan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Pelayanan Publik (IPP) - Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Evaluasi AKIP PD	Melakukan supervisi dengan bidang terkait evaluasi dan perbaikan nilai AKIP	81 Indeks	77.95 Indeks	96.23%	-	monev TB IV 2025	
5	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan review atas rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	1 Kegiatan	2 Kegiatan	110%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tindak lanjut rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	- Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur - Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan - Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal - Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP - Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal - Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	Melakukan evaluasi terkait pencapaian target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	-	monev TB IV 2025	
Rata-rata capaian					100.17%				

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

TRIBUNAN 4

Nama : JOKO TRIYONO

NIP : 197111161999031002

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI DUKUNG
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	- Realisasi Investasi Daerah	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	30000000000 Rupiah	1166705584104 Rupiah	110%	-	-	
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	- Realisasi Investasi Daerah	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	-	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	-	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil IKM di sukma santri	91 Indeks	91.72 Indeks	100.79%	-	-	
3	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait Pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%	-	-	
	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih dan Efektif	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi nilai RB Perangkat Daerah Target : 3 Kegiatan (nilai RB 80,50)	80.50 Nilai	80.52 Nilai	100.02%	-	-	
Rata-rata capaian					101.80%				

Atasan Langsung

Jombang, 09 Maret 2026
Plt.kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

WARSUBI
NIP. -

JOKO TRIYONO
NIP. 197111161999031002

TRIBULAN 1

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai RB	80.50 nilai	nilai	Belum Isi Realisasi	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Rp 0,00	Rp 0,00		Pengukuran di TB IV	-
2	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai ZI	84 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	2					Pengukuran di TB IV	-
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	15980000000 Rupiah	23000000000 Rupiah	120%	3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp 0,00	Rp 0,00		Tercapai 23 M pada TB I	-
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Indeks	N/A Indeks	Belum Rilis	4					Pengukuran di TB IV	-
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.2 Indeks	N/A Indeks	Belum Rilis	5					Pengukuran di TB IV	-
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	75 Indeks	N/A Indeks	Belum Rilis	6					Pengukuran di TB IV	-
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	81 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	7	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00		Pengukuran di TB IV	-
8	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100 Persen	25 Persen	25.00%	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 8.847.703.036,00	Rp 1.782.728.271,00	20.15%	-	-
9	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100 Persen	0 Persen	0.00%	9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 144.256.830,00	Rp 5.087.500,00	3.53%	Pengukuran di TB IV	-
10	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 Persen	0 Persen	0.00%	10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 527.546.150,00	Rp 11.877.050,00	2.25%	Pengukuran di TB IV	-
11	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	85 Persen	63.30 Persen	74.47%	11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 176.340.950,00	Rp 40.220.477,00	22.81%	-	-
12	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	85 Persen	62.11 Persen	73.07%	12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 158.341.250,00	Rp 127.196.420,00	80.33%	-	-
13	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 Persen	0 Persen	0.00%	13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 104.930.250,00	Rp 23.503.184,00	22.40%	Penilaian TB IV	-
Rata-rata kurja					41.79%							

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAN 2

Nama : WOR WINDARI

NIP : 197312041992022001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDUVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Realisasi (%)
1	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai RB	80.50 nilai	N/A nilai	Belum Rilis	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Rp 0,00	Rp 0,00		Penghitungan di TB IV 2025	Monev tiap TB
2	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai ZI	84 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	2		Rp 0,00	Rp 0,00		Penilaian di TB IV	-
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2000000000000 Rupiah	523537117693 Rupiah	26.18%	3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp 0,00	Rp 0,00		laporan berasal dari laporan LKPM TB I dan LKPM TB II 2025	monev tiap TB
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	4		Rp 0,00	Rp 0,00		Penilaian TB IV	Monitoring dan evaluasi tiap tribulan
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.2 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	5		Rp 0,00	Rp 0,00		Penilaian TB IV	Monitoring dan evaluasi tiap tribulan
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	75 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	6		Rp 0,00	Rp 0,00		penilaian TB IV	monev tiap tribulan
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	81 nilai	N/A nilai	Belum Rilis	7	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00		penghitungan di TB IV	monev tiap tribulan
8	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100 persen	50 persen	50.00%	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 75.206.000,00	Rp 39.182.195,00	52.10%	-	-
9	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100 persen	0 persen	0.00%	9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 288.513.660,00	Rp 33.882.020,00	11.74%	penghitungan di TB IV	monev tiap TB
10	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 persen	0 persen	0.00%	10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 1.055.092.300,00	Rp 41.083.600,00	3.89%	penghitungan di TB IV	monev Tiap TB
11	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	85 persen	82.95 persen	97.59%	11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 352.681.900,00	Rp 126.749.567,00	35.94%	data dari laporan rekap izin TB I dan TB II	monev tiap TB
12	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	85 persen	107.37 persen	110%	12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 316.682.500,00	Rp 257.274.040,00	81.24%	data dari laporan LKPM dan BAP pengawasan	monev tiap TB

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
13	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 persen	N/A persen	Belum Rilis	13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 209.860.500,00	Rp 65.261.568,00	31.10%	penilaian di TB IV	melakukan monev tiap tribulan
Rata-rata capaian					47.29%							

PENGUKURAN KINERJA

TRIBUNAL 3

Nama : WOR WINDARI

NIP : 197312041992022001

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai RB	80.50 nilai	N/A nilai	Belum Rilis	1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Rp 0,00	Rp 0,00		Penilaian di TB IV 2025	monev pelaksanaan RB
2	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Ekspetasi Pimpinan	Nilai ZI	84 Nilai	N/A Nilai	Belum Rilis	2		Rp 0,00	Rp 0,00		penilaian di TB IV 2025	monev pelaksanaan ZI
3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	2000000000000 Rupiah	523537117693 Rupiah	26.18%	3	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp 0,00	Rp 0,00		Data dari LKPM TB I dan TB II	monev LKPM
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	4		Rp 0,00	Rp 0,00		penilaian di TB IV 2025	monev IKM
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.2 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	5		Rp 0,00	Rp 0,00		penilaian di TB IV	monev penilaian IPP
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	75 indeks	N/A indeks	Belum Rilis	6		Rp 0,00	Rp 0,00		penilaian di TB IV	monev penilaian Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP PD	81 nilai	0 nilai	0.00%	7	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Rp 0,00	Rp 0,00		-	monev AKIP PD
8	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100 persen	75 persen	75.00%	8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.093.805.886,70	Rp 5.451.021.421,00	59.94%	-	monev pelaksanaan di TB IV
9	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Yang Dimanfaatkan	100 persen	75 persen	75.00%	9	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 248.331.850,00	Rp 163.413.416,00	65.80%	-	monev pelaksanaan TB IV
10	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Tindaklanjut Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	100 persen	75 persen	75.00%	10	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 423.471.130,00	Rp 282.580.550,00	66.73%	-	monev tindak lanjut penyelenggaraan promosi PM
11	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Sesuai SOP	85 persen	86.41 persen	101.66%	11	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 186.365.950,00	Rp 140.838.780,00	75.57%	Data dari jumlah izin yang terbit tepat waktu sesuai SOP dibagi dengan jumlah izin yang terbit	monev penerbitan perizinan
12	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	85 persen	104 persen	110%	12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 158.341.250,00	Rp 142.035.120,00	89.70%	Data dari pengawasan ke pelaku usaha	monev pengawasan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
13	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Di Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 persen	N/A persen	Belum Rilis	13	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 104.930.250,00	Rp 96.434.169,00	91.90%	penilaian di TB IV	monev pengguna sistem
Rata-rata capaian					66.12%							

PENGUKURAN KINERJA

Nama : JOKO TRIYONO

NIP : 197111161999031002

Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b

Jabatan : Plt.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	Meningkatnya Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	Prosentase Jenis Usaha Baru Yang Masuk di OSS	5 persen	5 persen	100.00%	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 423.471.130,00	Rp 404.066.184,00	95.42%	Berdasarkan Review Jumlah KBLI Baru di TB IV dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
2	Meningkatnya penambahan investasi baru	Prosentase penambahan investasi baru	10 persen	10 persen	100.00%	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 248.331.850,00	Rp 231.304.396,00	93.14%	Berdasarkan Rencana Investasi TB IV 2025 dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
3	Meningkatnya Layanan Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Standar Pelayanan	Persentase layanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	85 persen	95.76 persen	110%	3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 186.365.950,00	Rp 185.519.605,00	99.55%	Berdasarkan Rekap Izin TB IV dan Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
4	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan penanaman modal	80 persen	82.4 persen	103.00%	4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 158.341.250,00	Rp 158.007.658,00	99.79%	Berdasarkan Laporan LKPM TB IV dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81 Indeks	77.95 Indeks	96.23%	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 9.093.805.886,70	Rp 8.365.919.018,00	92.00%	Berdasarkan LHE RB 2025 dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
6	Meningkatnya peluang investasi daerah	Jumlah Jenis Usaha Baru yang masuk di oss	100 KBLI	N/A KBLI	Belum Rilis	6	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 423.471.130,00	Rp 404.066.184,00	95.42%	Berdasarkan Review Jumlah KBLI Baru di TB IV dan Laporan Monev TB IV 2025. Realisasi 89 KBLI yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
7	Tersedianya informasi potensi dan peluang investasi daerah	Jumlah pengguna informasi peta potensi	50 pengguna	N/A pengguna	Belum Rilis	7	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 248.331.850,00	Rp 231.304.396,00	93.14%	Berdasarkan Laporan Pengguna Potensi Investasi dan BA Laporan Monev TB IV 2025. Realisasi 50 pengguna yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
8	Meningkatnya pelayanan pengguna data pelayanan perizinan	Persentase pengguna data pelayanan perizinan	90 persen	102 persen	110%	8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 104.930.250,00	Rp 103.905.769,00	99.02%	Berdasarkan Laporan Pengguna Potensi Investasi dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
9	Terselenggaranya pelayanan perijinan	Prosentase Pelayanan Perizinan Yang Diterbitkan	90 %	95.18 %	105.76%	9	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 186.365.950,00	Rp 185.519.605,00	99.55%	Berdasarkan Rekap Izin TB IV dan Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
10	Meningkatnya pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Persentase Pengaduan Layanan Perizinan Yang Diselesaikan	100 %	100 %	100.00%	10	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 186.365.950,00	Rp 185.519.605,00	99.55%	Berdasarkan Rekap pengaduan TB IV 2025 dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
11	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah sesuai dengan aturan	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 Dokumen	N/A Dokumen	Belum Rilis	11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 43.570.200,00	Rp 43.446.423,00	99.72%	Realisasi 8 Dokumen yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
12	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Gaji dan Laporan keuangan SKPD tepat waktu	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	31 Laporan	N/A Laporan	Belum Rilis	12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 5.432.263.776,70	Rp 4.985.318.381,00	91.77%	Realisasi 31 Laporan yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
13	Terwujudnya penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	12 Laporan	N/A Laporan	Belum Rilis	13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 496.456.970,00	Rp 476.589.219,00	96.00%	Realisasi 12 Laporan yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
14	Terwujudnya Pengadaan barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Laporan	N/A Laporan	Belum Rilis	14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 82.495.000,00	Rp 74.805.000,00	90.68%	Realisasi 1 Laporan yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN X	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF / UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
15	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	N/A Laporan	Belum Rilis	15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 717.861.500,00	Rp 694.495.494,00	96.75%	Realisasi 12 Laporan yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
16	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Laporan	100 Laporan	110%	16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.321.158.440,00	Rp 2.091.264.501,00	90.10%	Realisasi 12 Laporan yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
17	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Perizinan	8 Dokumen	8 Dokumen	100.00%	17	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.930.250,00	Rp 103.905.769,00	99.02%	Berdasarkan Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
18	Tersedianya data Perizinan dan Non Perizinan serta dokumen standar pelayanan perizinan	Jumlah Pengguna data pelayanan perizinan	40000 Pengguna	N/A Pengguna	Belum Rilis	18	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.930.250,00	Rp 103.905.769,00	99.02%	Terealisasi 10.000 pengguna berdasarkan Laporan Monev TB IV 2025 yang tidak bisa rilis karena indikator pada Renstra baru 2025-2029	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
19	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	85 Perusahaan	282 Perusahaan	110%	19	Pengendalian Pelaksanaan Laporan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 158.341.250,00	Rp 158.007.658,00	99.79%	Berdasarkan Laporan LKPM TB IV dan BA Laporan Monev TB IV 2025	Melakukan Monitoring dan Evaluasi untuk penentuan target capaian kinerja pada tahun berikutnya
Rata-rata capaian					104.09%							

Atasan Langsung

Jombang, 09 Maret 2026
Plt.kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

WARSUBI
NIP. -

JOKO TRIYONO
NIP. 197111161999031002